



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI

Jl. H. Djaini, RT.007/RW.001, Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bks, Jawa Barat 17116

Provinsi
Jakarta

Provinsi
Jawa Barat



RENSTRA

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

TAHUN 2025-2029

Kabupaten
Bogor



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat diselesaikan.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini merupakan acuan untuk Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Penyusunan program/kegiatan di sekretariat dan bidang-bidang lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Koordinasi perencanaan kegiatan antar bidang lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Pengendalian program dan kegiatan di lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu mendorong dan mengakselerasikan gerak dan langkah seluruh jajaran dan staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan hingga ke tingkat dasar. Semoga dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Ucapan terima kasih kami ucapkan semua pihak yang membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan Ridho-Nya atas semua upaya yang akan kita kerjakan bersama. Amin.

Bekasi, 9 September 2025
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi



Widayat Subroto Hardi, S.T., M.T.
NIP. 197503202002121006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	1-4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-7
1.3.1 Maksud.....	1-7
1.3.2 Tujuan	1-7
1.4 Sistematika Penulisan.....	1-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	2-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	2-1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	2-8
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	2-8
2.1.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana/Data Aset Perangkat Daerah.....	2-9
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	2-12
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	2-43
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	2-43
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	2-43
2.2.2 Isu Strategis	2-45
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Disperkintan Tahun 2025-2029.....	3-1
3.2 Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra	3-9
3.3 Arah Kebijakan	3-10
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
4.1 Program DISPERKIMTAN Tahun 2025-2029	4-1
4.1.1 Uraian Program dan Kegiatan	4-5
4.1.2 Uraian Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	4-8
4.2 Program Prioritas DISPERKIMTAN	4-55
4.2.1 Program Prioritas Yang Mendukung Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan	4-58
4.2.2 Sub Kegiatan Yang Medukung Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	4-59
4.3 Program Dukungan DISPERKIMTAN Terhadap Pencapaian JABAR ISTIMEWA.....	4-60
4.4 Program Dukungan DISPERKIMTAN Terhadap Pencapaian ASTA CITA ...	4-63
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	4-63
4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD)	4-66



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	2-8
Tabel 2.2	Data PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	2-8
Tabel 2.3	Data ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	2-9
Tabel 2.4	Data Aset Aspek Sarana dan Prasarana Perkantoran	2-9
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	2-40
Tabel 2.6	Pemetaan Isu Strategis Kota Bekasi	2-47
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perkimtan Kota Bekasi Tahun 2025-2029	3-6
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Kinerja Dinas Perkimtan Kota Bekasi Tahun 2025-2029	3-7
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3-9
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3-11
Tabel 4.1	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	4-9
Tabel 4.2	Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator, Target dan Pagu Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.....	4-22
Tabel 4.3	Program/ Prioritas dan Pagu Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029.....	4-56
Tabel 4.4	Program/Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas Yang Mendukung Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan	4-58
Tabel 4.5	Daftar Sub Kegiatan Dalam Mendukung Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.....	4-59
Tabel 4.6	Program Dukungan DISPERKIMTAN Terhadap Pencapaian JABAR Istimewa	4-62
Tabel 4.7	Program Dukungan DISPERKIMTAN Terhadap Pencapaian Asta Cita	4-64
Tabel 4.8	Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029.....	4-65
Tabel 4.9	IKD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029.....	4-67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah	1-1
Gambar 1.2	Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	1-3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi	2-7
Gambar 2.2	Grafik Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2-13
Gambar 2.3	Grafik Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	2-14
Gambar 2.4	Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat	2-15
Gambar 2.5	Grafik Optimalisasi Disiplin Aparatur	2-15
Gambar 2.6	Grafik Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	2-16
Gambar 2.7	Grafik Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran.....	2-17
Gambar 2.8	Grafik Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur	2-17
Gambar 2.9	Grafik Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	2-18
Gambar 2.10	Grafik Persentase Peningkatan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran	2-19
Gambar 2.11	Grafik Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran.....	2-20
Gambar 2.12	Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Sanitasi Layak....	2-21
Gambar 2.13	Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Sanitasi Aman	2-21
Gambar 2.14	Grafik Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau.....	2-22
Gambar 2.15	Grafik Persentasi Penyediaan/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kota.....	2-23
Gambar 2.16	Grafik Persentase Lauasan Permukiman Kumuh Yang Diremajakan/Dipugar di Kawasan Perkotaan.....	2-24
Gambar 2.17	Grafik Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan.....	2-25
Gambar 2.18	Grafik Persentase Terasilitasinya Konflik Perkara Pertanahan Milik Pemkot.....	2-25
Gambar 2.19	Grafik Persentase Pemenuhan Pengadaan Tanah	2-26
Gambar 2.20	Grafik Presentase Penduduk Berakses Air Minum.....	2-27
Gambar 2.21	Grafik Cakupan Laingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU.....	2-28
Gambar 2.22	Grafik Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum	2-29
Gambar 2.23	Grafik Persentase Keretsediaan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	2-30
Gambar 2.24	Grafik Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Yang Berkualitas Baik	2-31
Gambar 2.25	Grafik Persentase Gedung Pendidikan Yang Berkualitas Baik	2-32
Gambar 2.26	Grafik Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Dalam Kondisi Baik.....	2-33
Gambar 2.27	Grafik Persentase Bangunan SMPN Disetiap Kelurahan Dalam Kondisi Baik.....	2-34
Gambar 2.28	Grafik Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dalam Kondisi Baik.....	2-35
Gambar 2.29	Grafik Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan Yang Berkualisa Baik ..	2-36
Gambar 2.30	Grafik Persentase Gedung Kesehatan Yang Berkualitas Baik.....	2-37
Gambar 2.31	Grafik Persentase Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Pelayanan Obstertu Neonatal Emergency Dasar (Poned)	2-38
Gambar 2.32	Grafik Persentase Ketersediaan Gedung RS Tipe D Tahun 2024 Dalam Kondisi Baik dan Berfungsi.....	2-39
Gambar 3.1	Hubungan Tujuan, Sasaran, Outcome RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	3-1
Gambar 3.2	Tujuan dan Sasarana Kota Bekasi Tahun 2025-2029	3-4
Gambar 4.1	Cascading Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	4-2



BAB 1

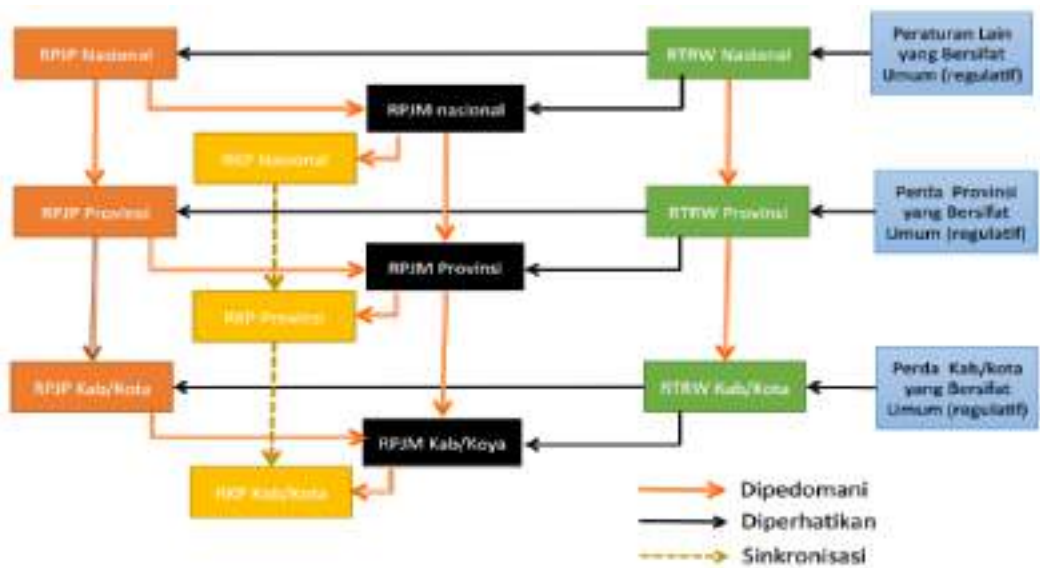
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Indonesia dilakukan secara bertingkat dan terintegrasi, dimulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Setiap tingkatan pemerintahan memiliki dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pusat dan daerah, termasuk rencana strategis (Renstra) perangkat daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab II Pasal 2 ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara berbagai pelaku pembangunan, baik antar tingkatan pemerintahan (pusat-daerah), antar sektor, maupun antar waktu. Sementara itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 menegaskan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hubungan antara dokumen perencanaan pembangunan pusat dan daerah tersebut tergambar dalam skema berikut.



Gambar 1.1
Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 bagian KEDUA huruf b Bupati/Wali Kota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses



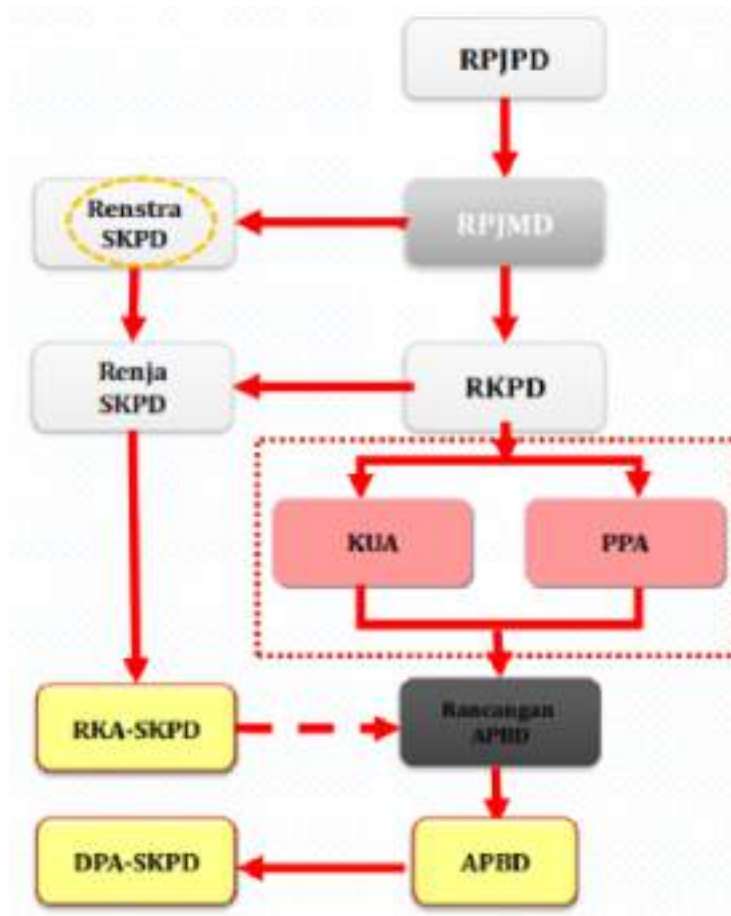
penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota. Bagian KETIGA huruf c Gubernur/Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota. Bagian KEENAM huruf b Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Penyusunan dokumen pembangunan tersebut dilakukan secara hirarkis dan saling mempengaruhi satu sama lain. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Sedangkan, RPJM Daerah, sebagai penjabaran visi Presiden dalam periode lima tahunan, berisi arah kebijakan, prioritas nasional, serta strategi pembangunan lintas sektor dan kewilayahan. Dalam konteks Kota Bekasi, berbagai isu strategis yang menjadi prioritas nasional seperti pengurangan kawasan kumuh, penyediaan hunian layak, pemenuhan standar pelayanan minimal, hingga pengelolaan lingkungan permukiman perlu disesuaikan dalam skala daerah.

Selain itu, Renstra juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Dokumen ini bersifat indikatif dan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah, sekaligus menjadi dasar evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja organisasi. Renstra turut merujuk pada hasil evaluasi periode sebelumnya sebagai dasar perbaikan dan penguatan strategi pembangunan ke depan. Berbagai hasil evaluasi tersebut juga perlu dibaca dalam konteks tantangan pembangunan daerah yang terus berkembang.

Dinamika pembangunan Kota Bekasi menunjukkan tantangan yang semakin kompleks. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berdampak langsung pada peningkatan kebutuhan hunian yang layak, serta tekanan terhadap ruang perkotaan yang terbatas. Keterbatasan lahan, tingginya permintaan rumah oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta keberadaan kawasan kumuh di beberapa lokasi menjadi persoalan mendesak yang harus ditangani secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel juga semakin meningkat, yang menuntut transformasi dalam sistem tata kelola pemerintahan. Sebagai respon atas tantangan tersebut, arah dan pendekatan kebijakan juga mengalami pergeseran.

Sebagai bagian dari sistem tersebut, Renstra Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai panduan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama lima tahun. Renstra ini disusun berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Bekasi, serta memperhatikan dokumen tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Integrasi antara kebijakan sektoral dan kebijakan spasial menjadi penting untuk memastikan sinergi antara pembangunan fisik dan pemanfaatan ruang di sektor perumahan, permukiman, dan pertanahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.2



Gambar 1. 2
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Perubahan kebijakan nasional, regional, dan global, termasuk arah pembangunan berkelanjutan dan transformasi digital, juga turut membentuk konteks baru dalam perumusan kebijakan sektoral. Oleh karena itu, Renstra Disperkimtan Tahun 2025–2029 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan juga menjadi dokumen strategis yang mampu mengarahkan pembangunan sektor perumahan, permukiman, dan pertanahan secara adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Lebih jauh, Renstra memiliki nilai strategis dalam menghubungkan kepentingan masyarakat dengan arah pembangunan daerah.

Nilai strategis dari dokumen Renstra Disperkimtan Tahun 2025–2029 terletak pada kemampuannya dalam menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dokumen ini diharapkan menjadi instrumen yang tidak hanya responsif terhadap isu-isu aktual seperti backlog perumahan, urbanisasi, dan ketimpangan akses terhadap lahan, tetapi juga mampu mengarahkan transformasi kelembagaan dan penguatan pelayanan publik menuju tata kelola yang lebih efektif, efisien, dan partisipatif. Dengan dasar tersebut, harapan terhadap penyusunan Renstra ini menjadi semakin jelas.

Dengan penyusunan Renstra ini, diharapkan Disperkimtan Kota Bekasi dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak, tertata, dan berkeadilan, serta berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Bekasi secara keseluruhan.



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025–2029 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

A. Peraturan Nasional

1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Kawasan Perumahan dan Permukiman yang berlaku saat ini adalah PP Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 14 Tahun 2016;
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2045;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020–2024;
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal;



20. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang Tahun 2020-2024; dan
21. Intruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

B. Regulasi Daerah

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2025–2045;
4. Rancangan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagai dokumen arah Pembangunan jangka menengah daerah yang sedang dalam proses penetapan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2024–2044;
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi Tahun 2024–2044;
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rumah Susun;;
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56 Tahun 2013 tentang Penataan Tempat Pemakaman Umum di Kota Bekasi;
13. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
14. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi;
15. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2018, Perubahan-perubahannya tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;



16. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi; dan
17. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep/716-Org/XII/2021 tentang Uraian Tugas Kelompok Substansi Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025–2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, yang selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rancangan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029.

Renstra ini juga dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta sebagai dasar evaluasi dan pengendalian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada bidang perumahan, permukiman dan pertanahan selama periode lima tahun.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renstra OPD Disperkimtan Kota Bekasi Tahun 2025–2029 bertujuan untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, capaian program RPJMD, dan kegiatan pembangunan daerah bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan.
- b. Menyusun arah kebijakan pembangunan lima tahunan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah.
- c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan.
- d. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- e. Menyediakan dokumen yang menjadi dasar dalam pengukuran capaian kinerja, baik secara internal maupun sebagai dasar penilaian akuntabilitas oleh publik dan lembaga pengawas eksternal.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



Tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM), kelompok sasaran layanan, permasalahan pelayanan perangkat daerah, isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan Renstra, Sasaran Renstra, Strategi Perangkat Daerah, Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisikan uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui IKU PD, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui IKD.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan, kaidah pelaksanaan, kaidah pengendalian dan evaluasi.



BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perumahan, kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dari Uraian tugas pokok tersebut, bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggungjawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses penyeharan perumahan, permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, investasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/masalah serta pemakaman.

Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maka dibentuk regulasi yaitu Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 127 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang dan kelompok jabatan fungsional;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
7. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;



9. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
10. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dibantu oleh Sekretariat, 3 bidang, 3 Unit pelaksana Teknis Dinas serta Fungsional yaitu:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

2. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perumahan, permukiman serta pembinaan dan penyuluhan perumahan dan permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengkajian, penyelenggaraan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dalam pelaksanaan perumahan dan prasarana umum perumahan;



- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengkajian, pembinaan, pengolahan dan pemantauan serta evaluasi dalam pelaksanaan penataan kawasan permukiman;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, penyuluhan, penyusunan, inventarisasi, fasilitasi dan pengolahan dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan perumahan dan permukiman;
- f. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan SKPD terkait;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas; dan
- i. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

3. Bidang Bangunan Gedung

Bidang Bangunan Gedung mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan perencanaan teknis, tata bangunan serta pemeliharaan infrastruktur bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bangunan Gedung mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pendataan, penyusunan, sosialisasi, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan pendataan dan perencanaan teknis bangunan;
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan tata bangunan gedung;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur bangunan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- i. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

4. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan inventarisasi, perencanaan dan pengadaan lahan serta penyelesaian konflik/masalah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:



- a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pendataan, inventarisasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan dan inventarisasi;
- d. Pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, penyusunan, analisa dan pengendalian dalam pelaksanaan perencanaan dan pengadaan lahan;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, inventarisasi, identifikasi, penetapan dan fasilitasi dalam pelaksanaan penyelesaian konflik/masalah;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Rumah Susun Sederhana (UPTD Rusunawa)

Merupakan rumah susun sederhana sewa yang disediakan Pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan akomodasi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dapat dihuni dan sewa secara bulanan maupun tahunan. Rumah Susun Umum Sewa sebagai salah satu bentuk permukiman vertikal, merupakan salah satu alternatif melakukan efisiensi penggunaan lahan dengan meningkatkan intensitas penggunaannya.

Untuk mendukung konsep pengembangan perumahan dan permukiman dalam rencana tata ruang wilayah yang dikaitkan pengembangan pembangunan daerah perkotaan secara vertikal dan untuk meremajakan daerah kumuh. Pengelolaan UPTD Rumah Susun Umum Sewa pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi mengacu pada beberapa SOP yang terdiri dari:

- a. SOP Pengoperasian dan Pemeliharaan Rusunawa;
- b. SOP Administrasi Umum dan Pemasaran Rusunawa;
- c. SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan; dan
- d. SOP Administrasi dan Keuangan Rusunawa.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengolahan Air Limbah Domestik (UPTD PALD)

Memiliki tujuan mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air. Dalam perizinannya operator air limbah wajib mendapat izin dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya izin dari Wali Kota Bekasi, dan kewajiban tangka septik tank yang terintegrasi pada IMB. Untuk retribusi UPTD PALD disesuaikan dengan perda retribusi yang dikelola oleh instansi yang berwenang Tujuan dari UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik yang melaksanakan tugas teknis pengolahan air limbah domestik dan berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tujuan atas:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;



- c. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan berkualitas lingkungan;
- d. Melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik; dan
- e. Mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman (UPTD Pemakaman)

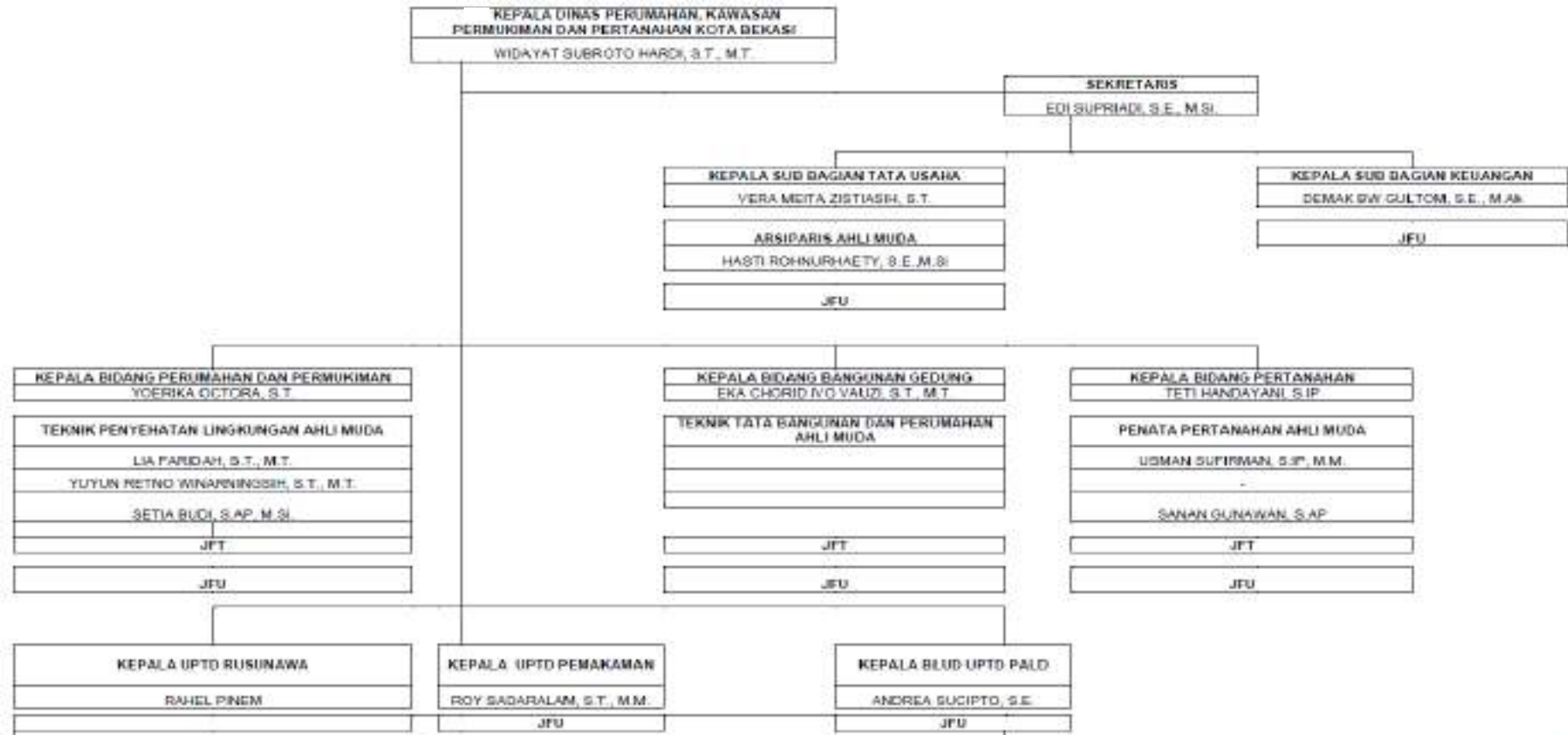
UPTD Pemakaman merupakan kawasan pemakaman yang biasanya diatur oleh pemerintah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. Lahan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi diatur dan dikelompokkan berdasarkan agama yang dianut. Pengelolaan UPTD Pemakaman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengacu pada beberapa SOP yang terdiri dari:

- a. SOP Penyusunan Jadwal Piket;
- b. SOP Sosialisasi Administrasi Perpanjangan Ijin Makam;
- c. SOP Pembukuan dan Penyetoran Retribusi Pengelolaan TPU;
- d. SOP Pelayanan Pemindahan Kerangka Jenazah;
- e. SOP Pelayanan Pemakaman;
- f. SOP Penyiapan Usulan Pengadaan Sarana dan Prasarana TPU;
- g. SOP Pembinaan Petugas Makam; dan
- h. SOP Pengelolaan Sarana dan Prasaran Penunjang Operasional Kegiatan.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi memiliki rincian sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas.
- 2. Sekretariat Dinas, terdiri atas:
 - a). Sub Bagian Tata Usaha.
 - b). Sub Bagian Keuangan.
- 3. Bidang Perumahan Permukiman, terdiri atas:
 - a). Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda.
- 4. Bidang Bangunan dan Gedung, terdiri atas:
 - a). Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda.
- 5. Bidang Pertanahan, terdiri atas:
 - a). Penata Pertanahan Ahli Muda.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD):
 - a). UPTD Rusunawa.
 - b). UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD).
 - c). UPTD Tempat Pemakaman Umum (TPU).
- 7. Bidang Pertanahan, terdiri atas:
 - a). Penata Pertanahan Ahli Muda.

Untuk lebih jelasnya mengenai Struktur Organisasi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

Paraf Koordinasi	
Kepala Disperkimtan	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum Setda	



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang didalamnya terbagi atas 1 Sekretariat, 3 Bidang, 9 Sub Bidang, 3 UPTD dan jabatan fungsional tertentu. Berikut ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menurut Status Kepegawaian :

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah
di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	79
2	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	47
3	Pekerja Harian Lepas (PHL)	191
	Total	317

Sumber: Data Kepagawaian DKPP, 2025

Dapat dilihat pada tabel diatas, pada tahun 2025 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 79 orang, Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 47 orang dan Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 191 orang. Maka jumlah pegawai pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebanyak 317 orang. Selain itu untuk data ASN berdasarkan Golongan Bulan Januari tahun 2025 terdiri dari Golongan IV sebanyak 8 orang, Golongan III sebanyak 51 orang, Golongan II sebanyak 17 orang dan Golongan I sebanyak 2 orang. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Data PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Berdasarkan Golongan Tahun 2025

Kategori		Jumlah Pegawai
Golongan	IV	8
	III	51
	II	17
	I	2
Jumlah		79

Sumber: Data Kepagawaian DKPP, 2025

Sedangkan data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 terdiri dari strata 2 sebanyak 14 orang, strata 1 sebanyak 132 orang, Diploma sebanyak 17, Sekolah Menengah Atas sebanyak 157 orang, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1 orang dan Sekolah Dasar sebanyak 11 orang. Untuk lebih jelasnya mengenai data ASN berdasarkan pendidikan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Data ASN Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

Jenjang	ASN	TKK	PHL
S2	14		
S1	42	32	11
D3	6	4	7
SMA	16	11	130



Jenjang	ASN	TKK	PHL
SMP	1	0	32
SD	0	0	11
TOTAL	79	47	191

Sumber: Data Kepagawaian DKPP, 2025

2.1.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana / Data Aset Perangkat Daerah

Inventarisasi aset merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset serta mendokumentasikannya baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Pada Inventarisasi aset berwujud perlu dilakukan dua hal yaitu fisik dan aspek legal aset.

Tujuan inventarisasi aset Barang Milik Negara/Daerah adalah kesempurnaan pengurusan dan pengawasan tata usaha keuangan Negara serta untuk tercapaiannya pengawasan yang efektif terhadap keuangan atau kekayaan Negara. Data aset yang terdapat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanaRhan Kota Bekasi sebagai berikut:

Tabel 2.4
Data Aset Aspek Sarana dan Prasarana Perkantoran

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Status Barang / Kondisi
1	Sepeda Motor	30	2005-2023	Inventaris/Baik
2	P.C. Unit	119	2000-2023	Inventaris/Baik
3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	109	2009-2023	Inventaris/Baik
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	16	1999-2021	Inventaris/Baik
5	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	114	2009-2023	Inventaris/Baik
6	Lemari Besi/Metal	47	2010-2022	Inventaris/Baik
7	Lemari Kaca	1	2018	Inventaris/Baik
8	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	2009-2023	Inventaris/Baik
9	Meja Rapat	5	2008-2023	Inventaris/Baik
10	Kursi Rapat	112	2010-2023	Inventaris/Baik
11	Meja Tambahan	2	2023	Inventaris/Baik
12	Sofa	11	2015-2023	Inventaris/Baik
13	Kendaraan Toilet	1	2023	Inventaris/Baik
14	mesin proses lainnya (dst)	6	2010	Inventaris/Baik
15	kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	4	2013-2015	Inventaris/Baik
16	Pompa Lumpur	1	2008	Inventaris/Baik
17	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1	2010	Inventaris/Baik
18	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1	2014	Inventaris/Baik
19	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	6	2009-2018	Inventaris/Baik
20	Mesin Pemotong Rumput	37	2008-2024	Inventaris/Baik
21	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1	2015	Inventaris/Baik
22	Filing Cabinet Besi	95	2004-2017	Inventaris/Baik
23	Alat Pengolah Air Limbah	2	2012-2018	Inventaris/Baik
24	Mobil Ambulance	5	2000-2021	Inventaris/Baik
25	Tandu dorong	2	2015-2016	Inventaris/Baik
26	Steam Cleaner	1	2015	Inventaris/Baik
27	Mesin Gergaji	2	2012-2019	Inventaris/Baik
28	Meja 1/2 Biro	64	2009-2015	Inventaris/Baik
29	Alat Rumah Tangga Lain-lain	19	2008-2022	Inventaris/Baik



No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Status Barang / Kondisi
30	Lampu	3	2011-2015	Inventaris/Baik
31	Sound System	3	2012-2021	Inventaris/Baik
32	alat angkutan apung bermotor khusus lainnya (dst)	1	2007	Inventaris/Baik
33	Meteran Kain	1	2009	Inventaris/Baik
34	Lemari Penyimpan	7	2014-2015	Inventaris/Baik
35	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2	2010	Inventaris/Baik
36	Rak Besi	38	2010-2023	Inventaris/Baik
37	Brandkas	3	2012-2013	Inventaris/Baik
38	Alat Penghancur Kertas	9	2009-2021	Inventaris/Baik
39	Papan Pengumuman	1	2011	Inventaris/Baik
40	White Board	1	2014	Inventaris/Baik
41	Alat Kantor Lainnya	8	2010-2022	Inventaris/Baik
42	Lemari Kayu	2	2010-2011	Inventaris/Baik
43	Meja Kerja Kayu	2	2008	Inventaris/Baik
44	Kursi Besi/Metal	5	2011	Inventaris/Baik
45	Kursi Tamu	3	2011-2015	Inventaris/Baik
46	Kursi Putar	78	2010-2015	Inventaris/Baik
47	Kursi Biasa	3	2011	Inventaris/Baik
48	Bangku Tunggu	14	2014-2019	Inventaris/Baik
49	Meja Komputer	3	2008-2012	Inventaris/Baik
50	Meubeleur lainnya	8	2007-2015	Inventaris/Baik
51	Lemari Es	2	2010	Inventaris/Baik
52	A.C. Window	9	2011-2016	Inventaris/Baik
53	Alat Pendingin lainnya	1	2014	Inventaris/Baik
54	Televisi	11	2010-2022	Inventaris/Baik
55	Camera film	1	2012	Inventaris/Baik
56	Dispenser	9	2014-2021	Inventaris/Baik
57	Handy Cam	2	2009	Inventaris/Baik
58	Alat Rumah Tangga Lain-lain	19	2008-2020	Inventaris/Baik
59	Lap Top	45	2009-2023	Inventaris/Baik
60	Note Book	16	2008-2017	Inventaris/Baik
61	Hub	1	2013	Inventaris/Baik
62	Meja Kerja Pejabat lain-lain	10	2013-2015	Inventaris/Baik
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	19	2010-2023	Inventaris/Baik
64	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	3	2010	Inventaris/Baik
65	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	5	2009	Inventaris/Baik
66	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	2009-2015	Inventaris/Baik
67	Camera Video	10	2014-2018	Inventaris/Baik
68	Layar Film/Projector	6	2006-2023	Inventaris/Baik
69	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5	2015	Inventaris/Baik
70	Drill Machine	1	2015	Inventaris/Baik
71	mesin bor lainnya (dst)	2	2015	Inventaris/Baik
72	Grating Generator Unit	1	2015	Inventaris/Baik
73	Amplifier	1	2015	Inventaris/Baik
74	Mesin Pembuat Huruf	1	2015	Inventaris/Baik
75	Global Positioning System	7	2015-2016	Inventaris/Baik
76	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	2015	Inventaris/Baik
77	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	2005	Inventaris/Baik
78	Bor	1	2016	Inventaris/Baik
79	Mesin Frais	1	2016	Inventaris/Baik
80	Slump Test Set	1	2016	Inventaris/Baik
81	Mesin Kompresor	1	2016	Inventaris/Baik
82	Server	2	2016-2023	Inventaris/Baik
83	Hard Disk	11	2016-2020	Inventaris/Baik



No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Status Barang / Kondisi
84	Telephone Mobile	22	2016	Inventaris/Baik
85	Mesin Cacad	6	2016	Inventaris/Baik
86	Sea Water Reservoir	1	2016	Inventaris/Baik
87	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	1	2016	Inventaris/Baik
88	Overhead Projector	2	2016-2019	Inventaris/Baik
89	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	44	2015-2020	Inventaris/Baik
90	alat ukur universal lainnya (dst)	8	2017	Inventaris/Baik
91	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	17	2015-2023	Inventaris/Baik
92	Alat Tangki Pengapungan	1	2017	Inventaris/Baik
93	Mesin Absensi	8	2017-2023	Inventaris/Baik
94	Tool Kit Box	2	2017	Inventaris/Baik
95	Generator	1	2018	Inventaris/Baik
96	Wireless	2	2018	Inventaris/Baik
97	Pompa Airasil	1	2018	Inventaris/Baik
98	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	2	2018	Inventaris/Baik
99	pompa lainnya (dst)	4	2018-2023	Inventaris/Baik
100	A.C. Split	59	2018-2024	Inventaris/Baik
101	Pesawat Telephone	3	2019	Inventaris/Baik
102	Treng Air/Tandon Air	3	2020	Inventaris/Baik
103	Monitor	2	2020	Inventaris/Baik
104	Mesin Fotocopy Lainnya	1	2020	Inventaris/Baik
105	Control Panel	5	2020	Inventaris/Baik
106	Submersible Pump	1	2020	Inventaris/Baik
107	Microphone/Wireless MIC	1	2021	Inventaris/Baik
108	LCD Projector/Infocus	3	2021-2022	Inventaris/Baik
109	Tangga Aluminium	1	2021	Inventaris/Baik
110	Peralatan Las Listrik	1	2021	Inventaris/Baik
111	Peralatan Permainan lainnya	1	2021	Inventaris/Baik
112	Kursi Lipat	40	2021	Inventaris/Baik
113	CCTV - Camera Control Television System	13	2021-2024	Inventaris/Baik
114	Mobil Jenazah	1	2021	Inventaris/Baik
115	excavator lainnya (dst)	1	2021	Inventaris/Baik
116	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1	2021	Inventaris/Baik
117	Hand Fallet	1	2022	Inventaris/Baik
118	Pompa Air	8	2022-2024	Inventaris/Baik
119	Mesin Bor	1	2022	Inventaris/Baik
120	Alat Pembersih lainnya	1	2022	Inventaris/Baik
121	Camera Digital	1	2022	Inventaris/Baik
122	Alat Studio Lainnya	1	2022	Inventaris/Baik
123	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2023	Inventaris/Baik
124	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	1	2023	Inventaris/Baik
125	Lemari Arsip Pejabat lainnya	4	2023	Inventaris/Baik
126	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	2023	Inventaris/Baik
127	Peralatan Komputer lainnya	1	2023	Inventaris/Baik
128	Sumur Pemboran Air	1	2023	Inventaris/Baik
129	Peta	1	2022	Inventaris/Baik
130	Handy Talky (HT)	1	2017	Inventaris/Baik
131	Multi Purpose Vehicle (MPV)	2	2024	Inventaris/Baik
132	Tangki Air	1	2024	Inventaris/Baik

Sumber : Data Kepagawaian DKPP, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



Kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam dokumen *strategic planning*. Sementara itu, pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

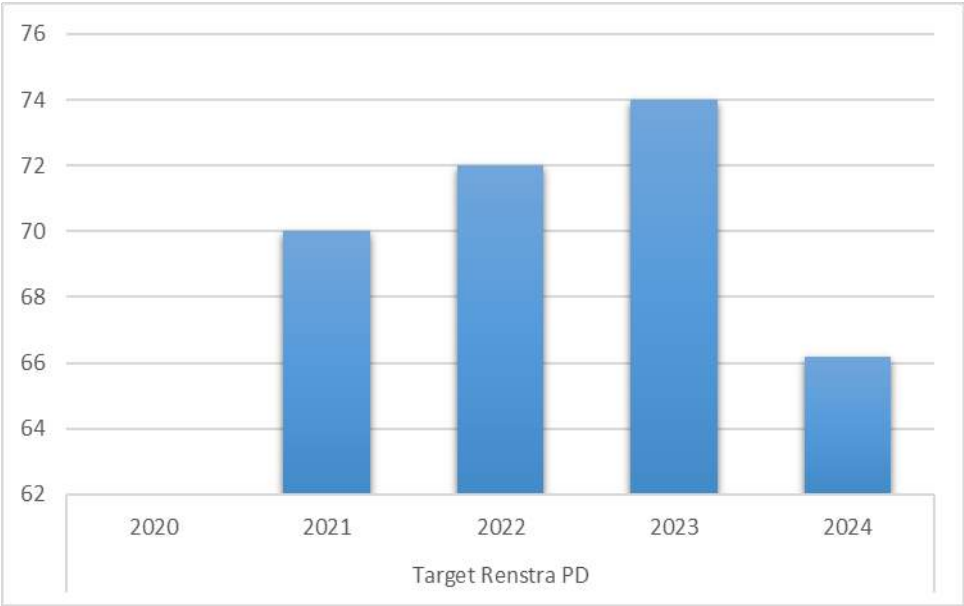
Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi diukur berdasarkan capaian kinerja pada periode sebelumnya, meliputi:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah, meliputi:

a. Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Target Renstra Perangkat tahun 2020-tahun 2024 pada presentase peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengalami fluktuasi pada tahun 2021 sebesar 70,00% mengalami kenaikan sebesar 4 % menjadi 74,00% pada tahun 2023 sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 7,81% menjadi 66,19%.

Untuk lebih jelasnya mengenai presentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2
Grafik Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Berdasarkan target renstra perangkat daerah nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Perumahanm Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021 sebesar 78,8 %, meningkat 3,2 % pada tahun 2023 menjadi 82 % dan mengalami penurunan sebesar 12 % pada tahun 2024 menjadi 70 %.

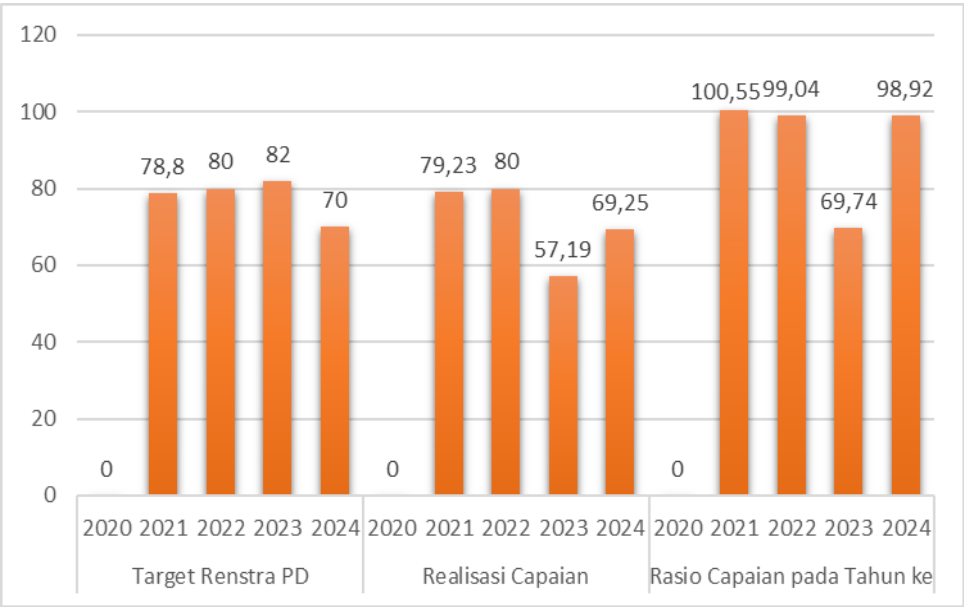
Berdasarkan realisasi capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Perumahanm Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021 sebesar 79,23%, mengalami kenaikan sebesar 0,77% pada tahun 2022 menjadi 80%, pada



tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 22,81% menjadi 57,19 % dan mengalami kenaikan sebesar 12,06% pada tahun 2024 menjadu 69,25%.

Berdasarkan rasio capaian pada tahun 2021 nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar 100,55%, mengalami penurunan sebesar 1,51 pada tahun 2022 menjadi 99,04 %, mengalami penurunan kembali sebesar 29,3 % pada tahun 2023 menjadi 69,74 %, sedangkan untuk tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 29,18% menjadi 98,92 %.

Untuk lebih jelasnya mengenai nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dapat dilihat pada gambar 2.3.



Gambar 2.3
Grafik Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

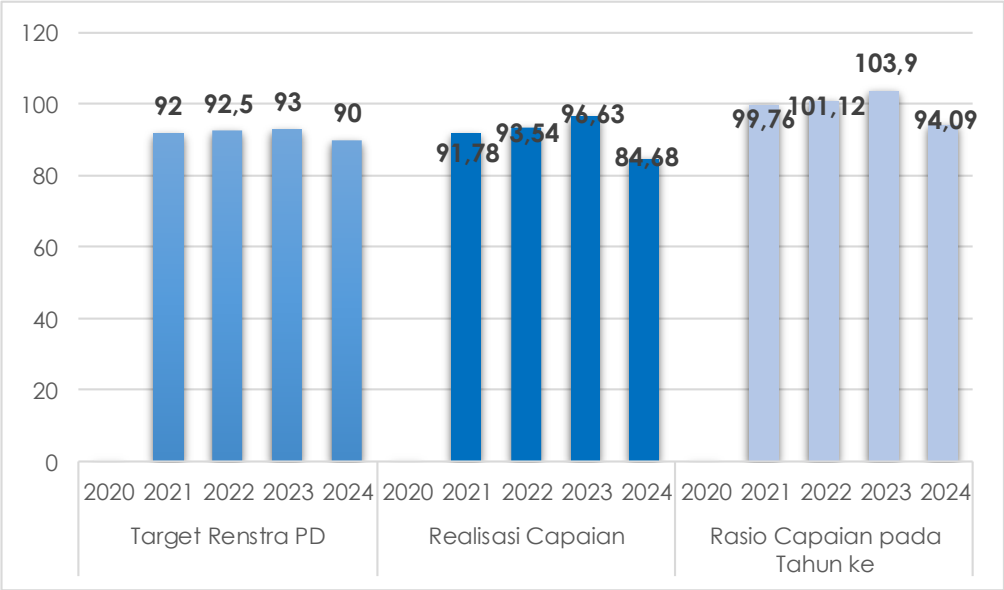
c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan target renstra indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 sebesar 92 % meningkat sampai dengan tahun 2023 menjadi 93 % dan mengalami penurunan sebesar 3% pada tahun 2024 menjadi 90%.

Berdasarkan realisasi capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 sebesar 91,78%, meningkat sebesar 1,76 % pada tahun 2022 menjadi 93,54%, kembali meningkat sebesar 3,09% pada tahun 2023 menjadi 96,63%, sedangkan tahun 2024 indeks kepuasan masyarakat mengalami penurunan sebesar 11,95% menjadi 84,68%.

Berdasarkan rasio capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 sebesar 99,76%, meningkat sebesar 1,36 % pada tahun 2022 menjadi 101,12%, kembali meningkat sebesar 2,78% pada tahun 2023 menjadi 103,9%, sedangkan tahun 2024 indeks kepuasan masyarakat menurun sebesar 9,81 % menjadi 94,09 %.

Untuk lebih jelasnya mengenai indeks kepuasan masyarakat dapat dilihat pada gambar 2.4.



Gambar 2.4
Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat

d. Optimalisasi Disiplin Aparatur

Berdasarkan target renstra optimalisasi disiplin aparaturnya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100 %. Realisasi capaian optimalisasi disiplin aparaturnya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 100 % dan rasio capaian optimalisasi disiplin aparaturnya tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebesar 100 %.

Untuk lebih jelasnya mengenai optimalisasi disiplin aparaturnya dapat dilihat pada gambar 2.5.



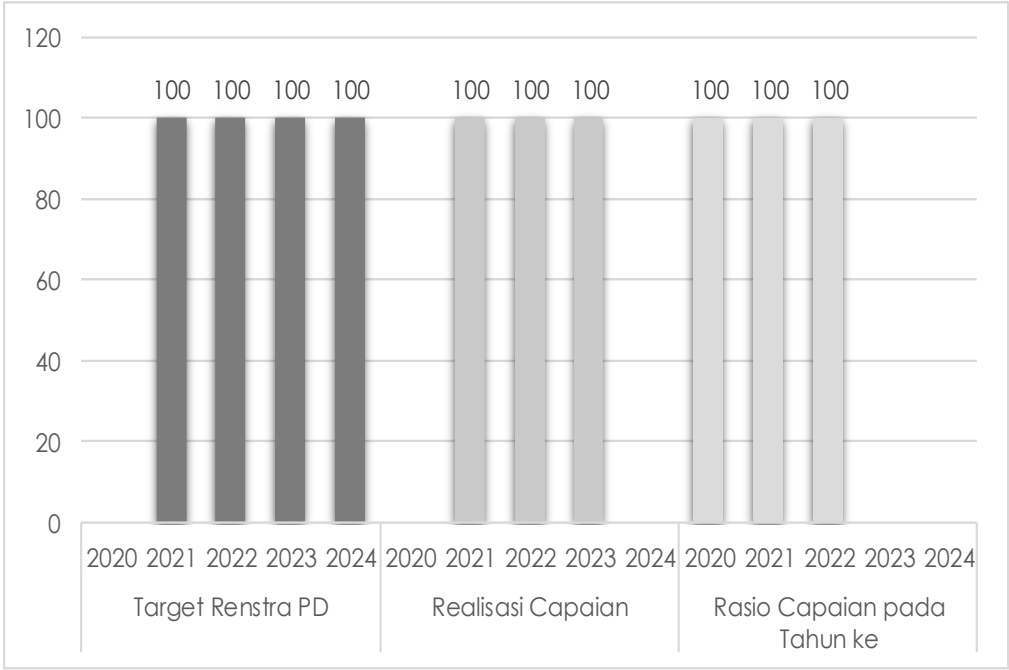
Gambar 2.5
Grafik Optimalisasi Disiplin Aparatur

e. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Berdasarkan target renstra optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%. Realisasi capaian optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 100 % dan rasio capaian optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%.



Untuk lebih jelasnya mengenai optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat dilihat pada gambar 2.6.

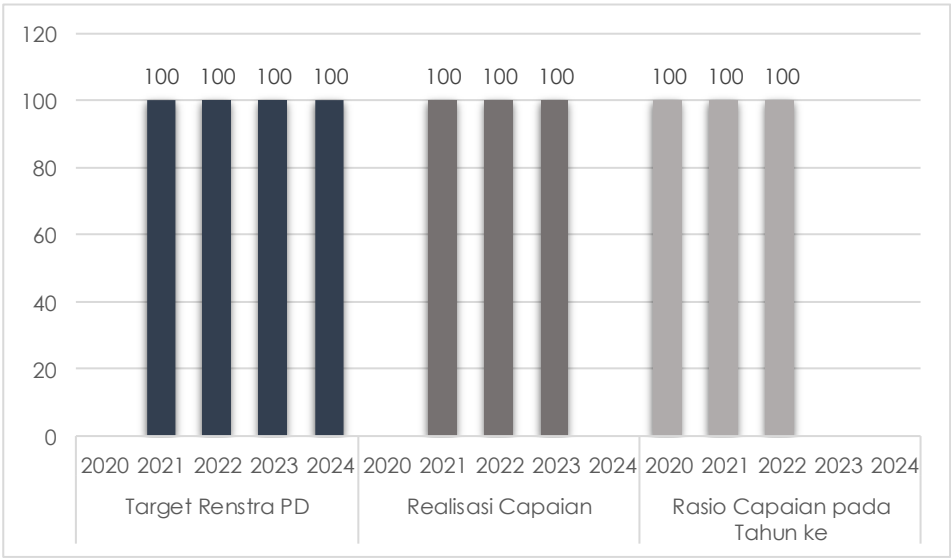


Gambar 2.6
Grafik Optimalisasi Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

f. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Berdasarkan target renstra optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%. Realisasi capaian optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 100 % dan rasio capaian optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%.

Untuk lebih jelasnya mengenai optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran dapat dilihat pada gambar 2.7.



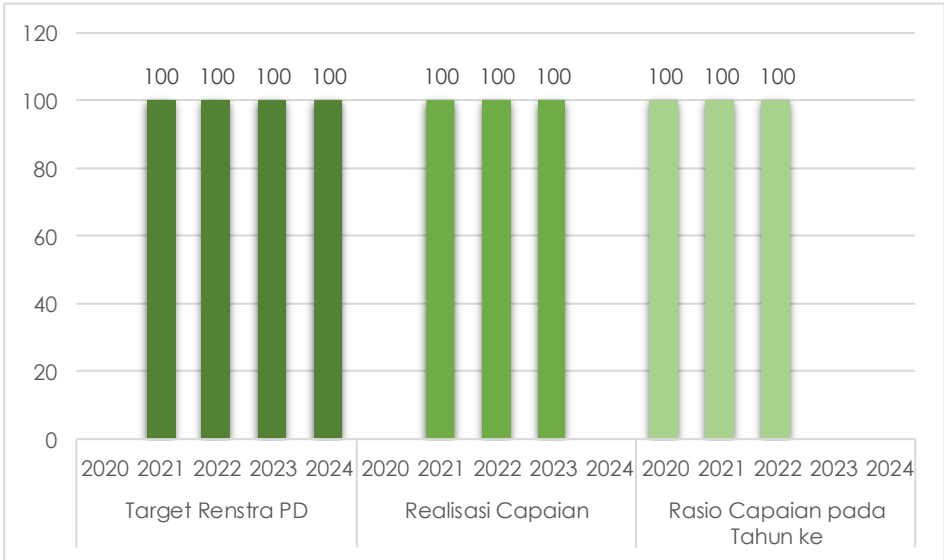
Gambar 2.7
Grafik Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran



g. Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan target renstra optimalisasi peningkatan sumber daya aparatur pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%. Realisasi capaian optimalisasi peningkatan sumber daya aparatur pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 100 % dan rasio capaian optimalisasi peningkatan sumber daya aparatur tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%.

Untuk lebih jelasnya mengenai optimalisasi peningkatan sumber daya aparatur dapat dilihat pada gambar 2.8.

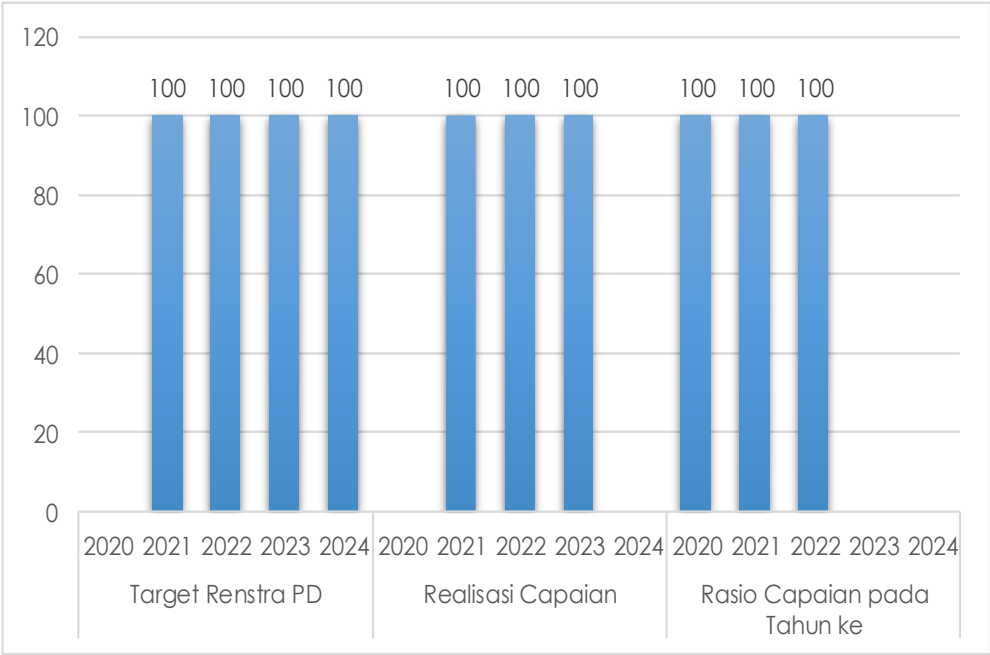


Gambar 2.8
Grafik Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur

h. Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Berdasarkan target renstra optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%. Realisasi capaian optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 100 % dan rasio capaian optimalisasi pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%.

Untuk lebih jelasnya mengenai optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan dapat dilihat pada gambar 2.9.



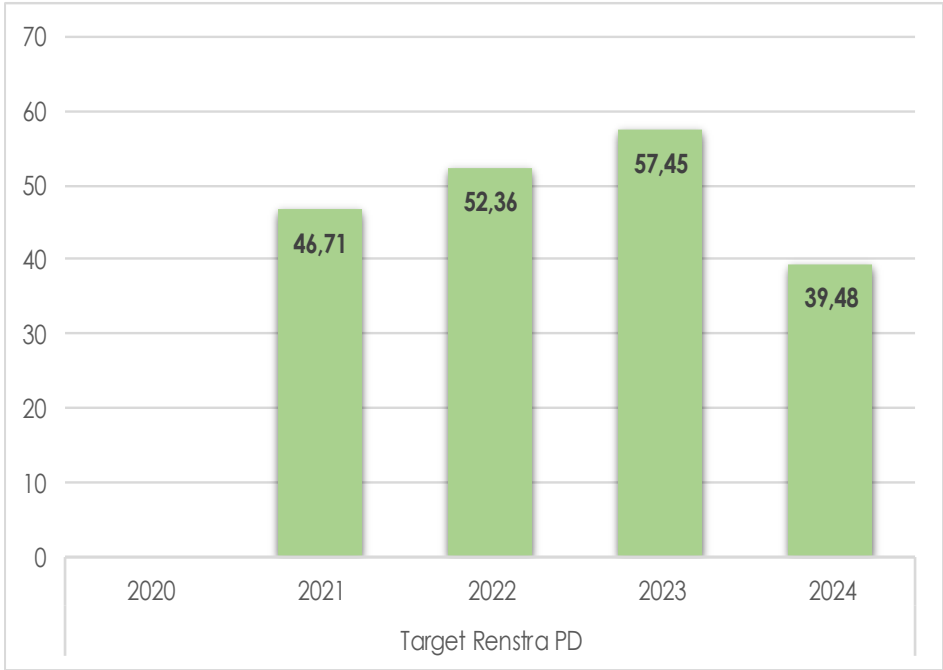
Gambar 2.9
Grafik Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

a. Persentase Peningkatan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran

Berdasarkan target renstra persentase peningkatan kualitas PSU, lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan perkantoran pada tahun 2021 sebesar 41,71 %, pada tahun 2022 persentase peningkatan kualitas PSU, lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan perkantoran mengalami peningkatan sebesar 5,65 % menjadi 52,36 %, meningkat kembali pada tahun 2023 sebesar 5,09 % menjadi 57,45%, pada tahun 2024 persentase peningkatan kualitas PSU, lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan perkantoran mengalami penurunan sebesar 17,97% menjadi 39,48%.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase peningkatan kualitas PSU, lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan perkantoran dapat dilihat pada gambar 2.10.



Gambar 2.10
Grafik Persentase Peningkatan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perkantoran

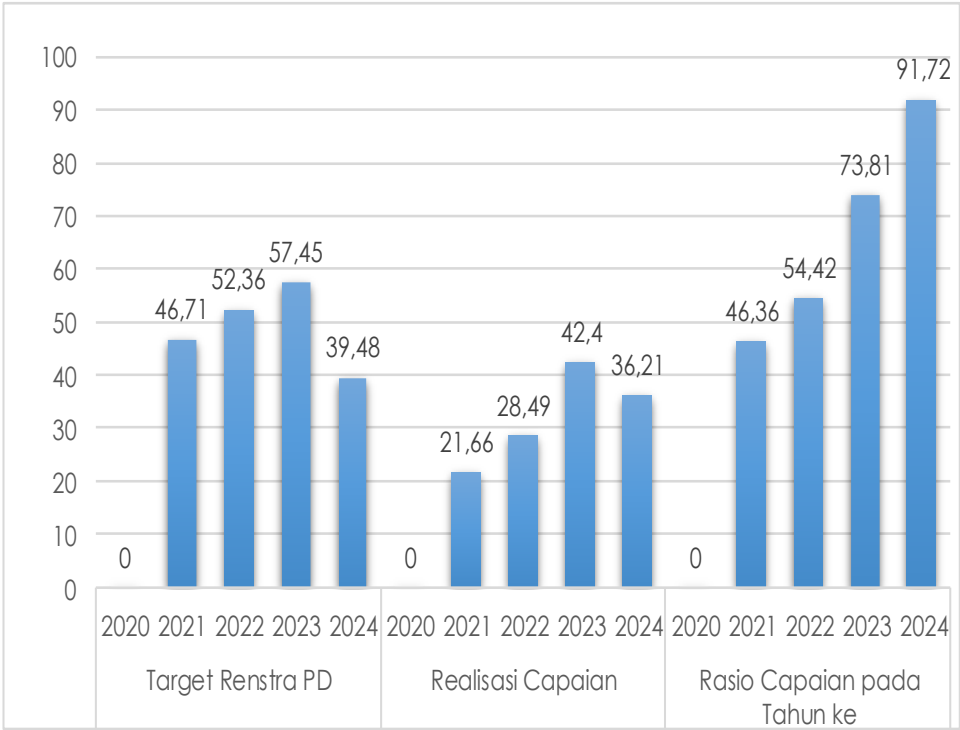
b. Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran

Berdasarkan target renstra cakupan kualitas PSU, lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan perkantoran pada tahun 2021 sebesar 46,71%, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,65% menjadi 52,36%, pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 5,09 % menjadi 57,45%, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 17,97% menjadi 39,48%.

Berdasarkan realisasi capaian cakupan kualitas PSU, lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan perkantoran tahun 2021 sebesar 21,66 %, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,83% menjadi 28,49 %, pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 13,91% menjadi 42,4% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 6,19% menjadi 36,21%

Berdasarkan rasio capaian cakupan kualitas PSU, lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan perkantoran pada tahun 2021 sebesar 46,36%, pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 8,06% menjadi 54,42%, pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 19,39 % menjadi 73,81 % dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 17,91 % menjadi 91,72%.

Untuk lebih jelasnya mengenai cakupan kualitas PSU, lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan perkantoran dapat dilihat pada gambar 2.11.

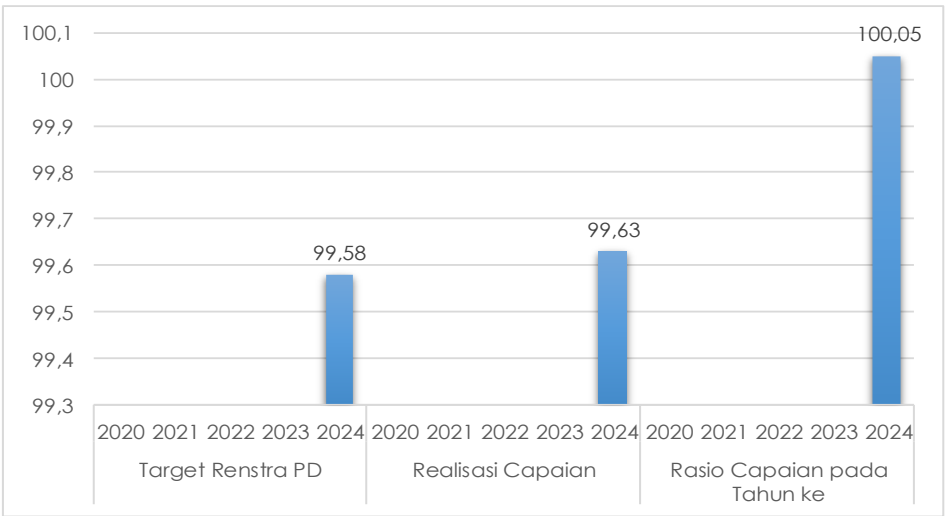


Gambar 2.11
Grafik Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perkantoran

c. Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak

Berdasarkan target renstra persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak pada tahun 2024 sebesar 99,58 %. Berdasarkan realisasi capaian persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak pada tahun 2024 sebesar 99,63% dan berdasarkan rasio capaian persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak pada tahun 2024 sebesar 100,05%.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak dapat dilihat pada gambar 2.12.

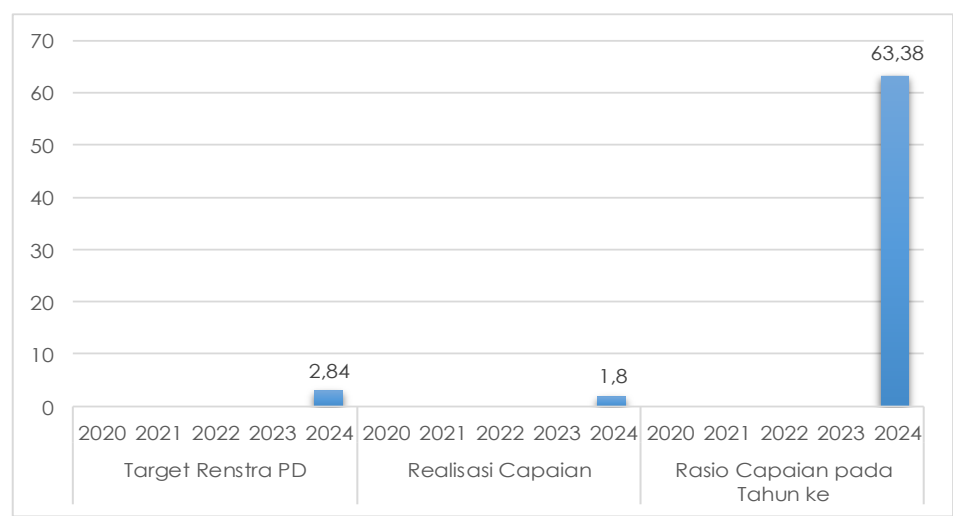


Gambar 2.12
Grafik Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Sanitasi Layak



d. **Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman**

Berdasarkan target renstra persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi aman pada tahun 2024 sebesar 2,84 %. Berdasarkan realisasi capaian persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi aman pada tahun 2024 sebesar 1,8% dan berdasarkan rasio capaian persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi aman pada tahun 2024 sebesar 63,38%. Untuk lebih jelasnya mengenai persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi aman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dapat dilihat pada gambar 2.13.



Gambar 2.13
Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Sanitasi Aman

3. **Program Pengembangan Perumahan**

a. **Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau**

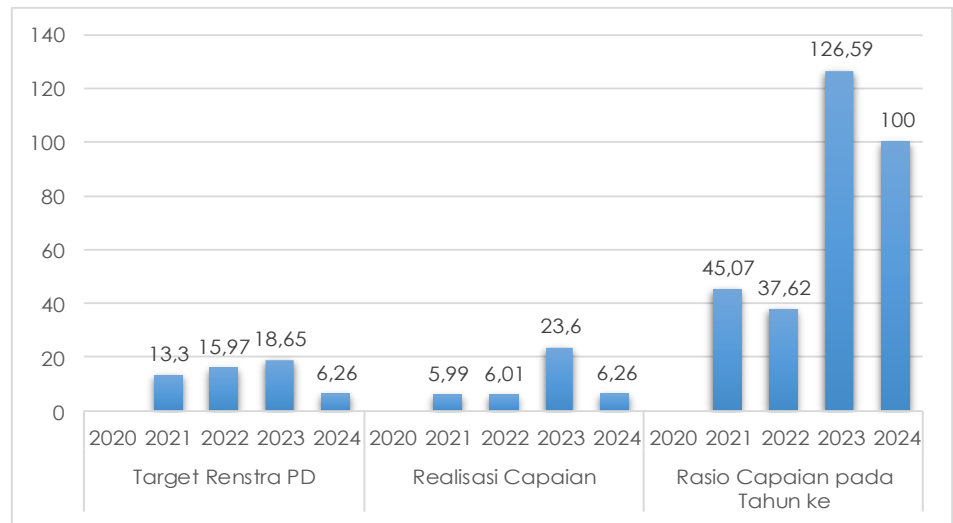
Berdasarkan target renstra cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2021 sebesar 13,3 %, pada tahun 2022 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mengalami peningkatan sebesar 2,67% menjadi 15,97%, pada tahun 2023 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau meningkat sebesar 2,68% menjadi 18,65%, pada tahun 2024 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mengalami penurunan sebesar 12,39 % menjadi 6,26%.

Berdasarkan realisasi capaian cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau tahun 2021 sebesar 5,99%, pada tahun 2022 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mengalami peningkatan sebesar 0,02 % menjadi 6,01%, pada tahun 2023 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mengalami peningkatan sebesar 17,59% menjadi 23,6% dan pada tahun 2024 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mengalami penurunan sebesar 17,34% menjadi 6,26%.

Berdasarkan rasio capaian cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2021 sebesar 45,07 %, pada tahun 2022 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mengalami penurunan sebesar 7,45% menjadi 37,62 %, pada tahun 2023 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mengalami peningkatan sebesar 88,97% menjadi 126,59% dan pada tahun 2024 cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau mengalami penurunan sebesar 26,59% menjadi 100%.



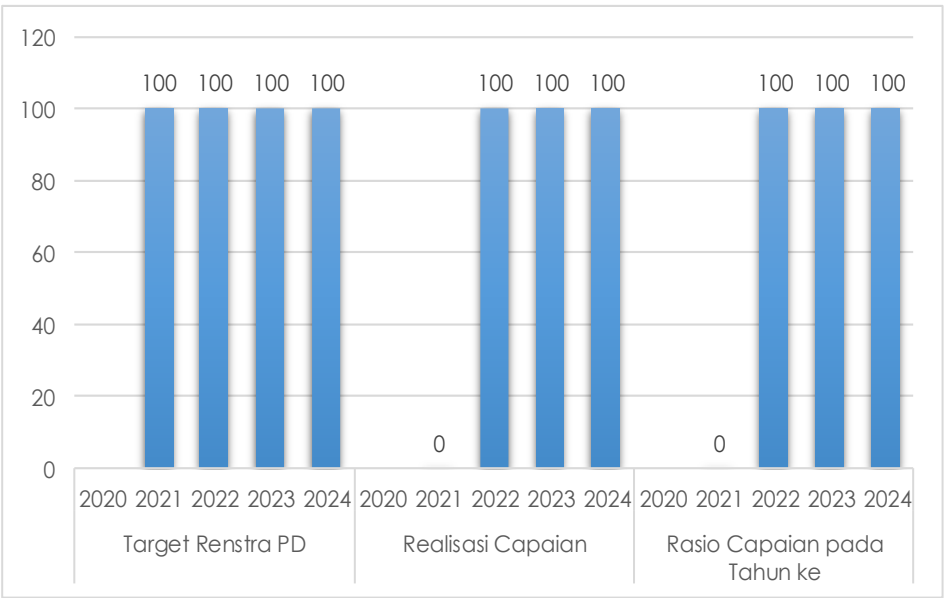
Untuk lebih jelasnya mengenai cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dapat dilihat pada gambar 2.14.



Gambar 2.14
Grafik Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau

b. Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota

Berdasarkan target renstra persentase penyediaan/rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kota pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%. Realisasi capaian persentase penyediaan/rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kota tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%, sedangkan rasio capaian persentase penyediaan/rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kota tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya mengenai persentase penyediaan/rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kota dapat dilihat pada gambar 2.15.

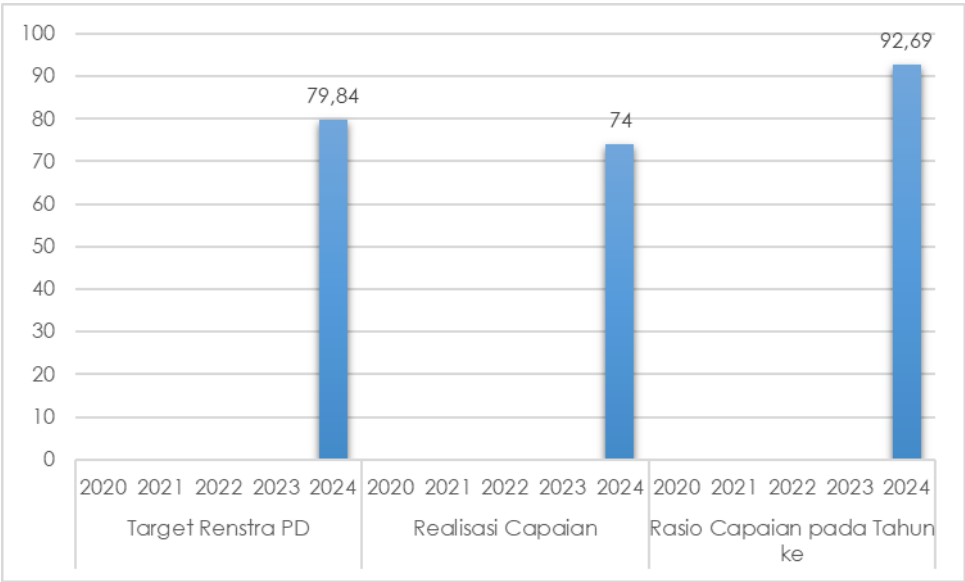


Gambar 2.15
Grafik Persentase Penyediaan/Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kota



4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Persentase luasan permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikawasan perkotaan termasuk pada program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, berdasarkan target renstra pada tahun 2024 sebesar 79,84%, untuk realisasi capaian tahun 2024 sebesar 74% dan rasio capaian tahun 2024 sebesar 92,69%. Untuk lebih jelasnya mengenai persentase luasan permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikawasan perkotaan dapat dilihat pada gambar 2.16.



Gambar 2.16
Grafik Persentase Luasan Permukiman Kumuh Yang Diremajakan/Dipugar
Dikawasan Perkotaan

5. Program Kawasan Permukiman

Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan termasuk kedalam program kawasan permukiman. Berdasarkan target renstra persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan pada tahun 2021 sebesar 66,76%, pada tahun 2022 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mengalami peningkatan sebesar 17,65 % menjadi 84,41%, pada tahun 2023 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mengalami peningkatn sebesar 15,59 % menjadi 100%, sedangkan pada tahun 2024 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mengalami penurunan sebesar 98,36% menjadi 1,64%.

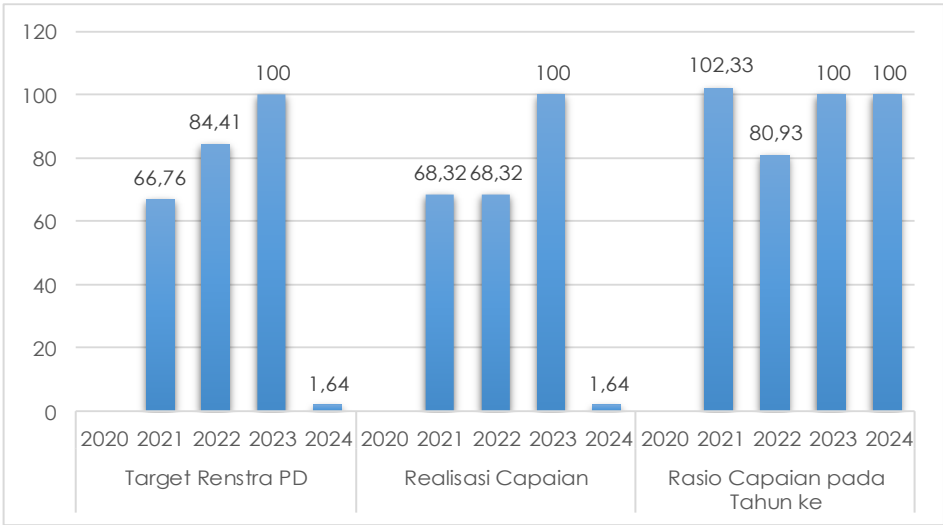
Berdasarkan realisasi capaian persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 68,32 %, pada tahun 2023 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mengalami peningkatan sebesar 31,68 % menjadi 100%, sedangkan pada tahun 2024 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mengalami penurunan sebesar 89,36% menjadi 1,64%.

Berdasarkan rasio capaian persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan tahun 2021 sebesar 102,33 %, pada tahun 2022 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mengalami penurunan sebesar 21,4% menjadi 80,93 %, pada tahun 2023 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mengalami peningkatan



sebesar 19,07% menjadi 100%, sedangkan pada tahun 2024 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sama sebesar 100%.

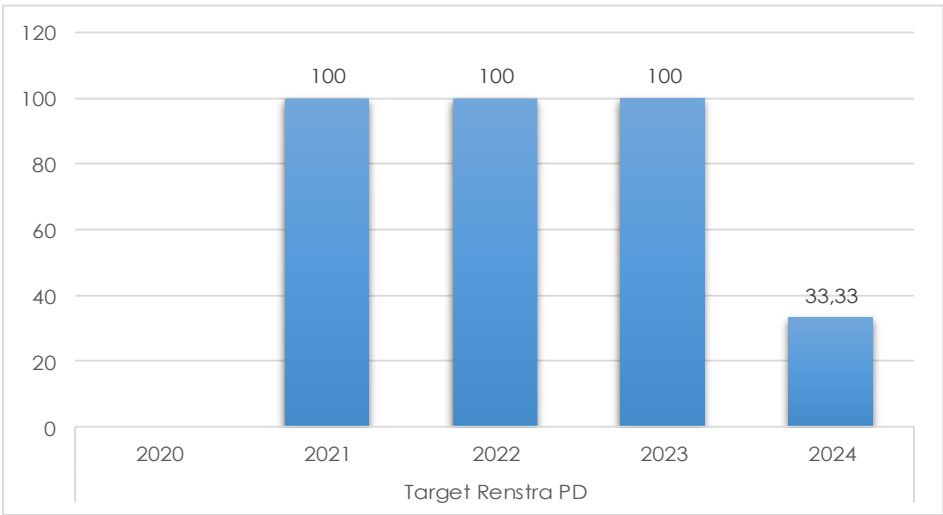
Untuk lebih jelasnya mengenai persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan dapat dilihat pada gambar 2.17.



Gambar 2.17
Grafik Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan

6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot termasuk kedalam program penyelesaian sengketa tanah garapan. Berdasarkan target renstra persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 100 %, pada tahun 2024 persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot mengalami penurunan sebesar 66,67 % menjadi 33,33%. Untuk lebih jelasnya mengenai persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot dapat dilihat pada gambar 2.18.



Gambar 2.18
Grafik Persentase Terfasilitasinya Konflik Perkara Pertanahan Milik Pemkot



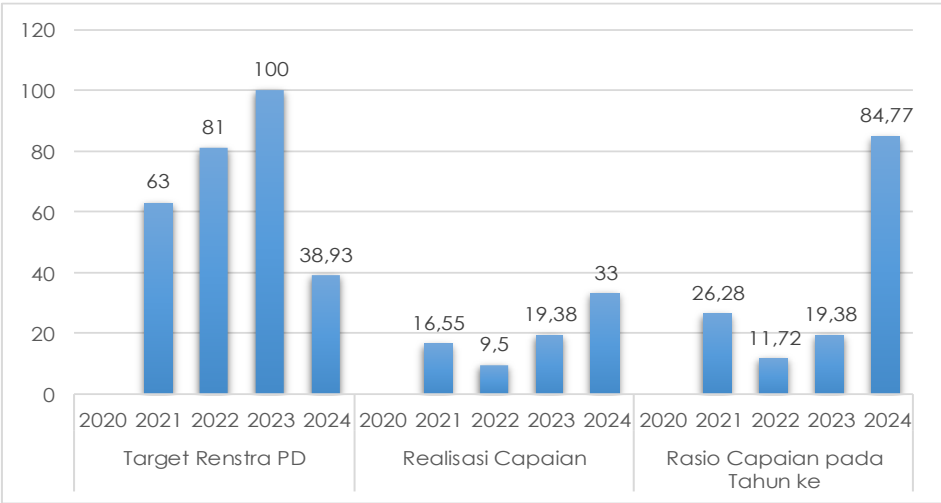
7. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Persentase pemenuhan pengadaan tanah termasuk kedalam program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Berdasarkan target renstra persentase pemenuhan pengadaan tanah tahun 2021 sebesar 63%, pada tahun 2022 persentase pemenuhan pengadaan tanah mengalami peningkatan sebesar 18% menjadi 81%, pada tahun 2023 persentase pemenuhan pengadaan tanah mengalami peningkatan sebesar 19 % menjadi 100%, sedangkan pada tahun 2024 persentase pemenuhan pengadaan tanah mengalami penurunan sebesar 61,07% menjadi 38,93%.

Berdasarkan realisasi capaian persentase pemenuhan pengadaan tanah tahun 2021 sebesar 16,55 %, pada tahun 2022 persentase pemenuhan pengadaan tanah mengalami penurunan sebesar 7,05% menjadi 9,5%, pada tahun 2023 persentase pemenuhan pengadaan tanah mengalami peningkatan sebesar 9,88% menjadi 19,38% sedangkan tahun 2024 persentase pemenuhan pengadaan tanah mengalami peningkatan sebesar 13,62% menjadi 33 %.

Berdasarkan rasio capaian persentase pemenuhan pengadaan tanah tahun 2021 sebesar 26,28%, pada tahun 2022 persentase pemenuhan pengadaan tanah mengalami penurunan sebesar 14,56% menjadi 11,72 %, pada tahun 2023 persentase pemenuhan pengadaan tanah mengalami peningkatan sebesar 7,66% menjadi 19,38% dan pada tahun 2024 persentase pemenuhan pengadaan tanah mengalami peningkatan sebesar 65,39% menjadi 84,77%.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase pemenuhan pengadaan tanah dapat dilihat pada gambar 2.19.



Gambar 2.19
Grafik Persentase Pemenuhan Pengadaan Tanah

8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

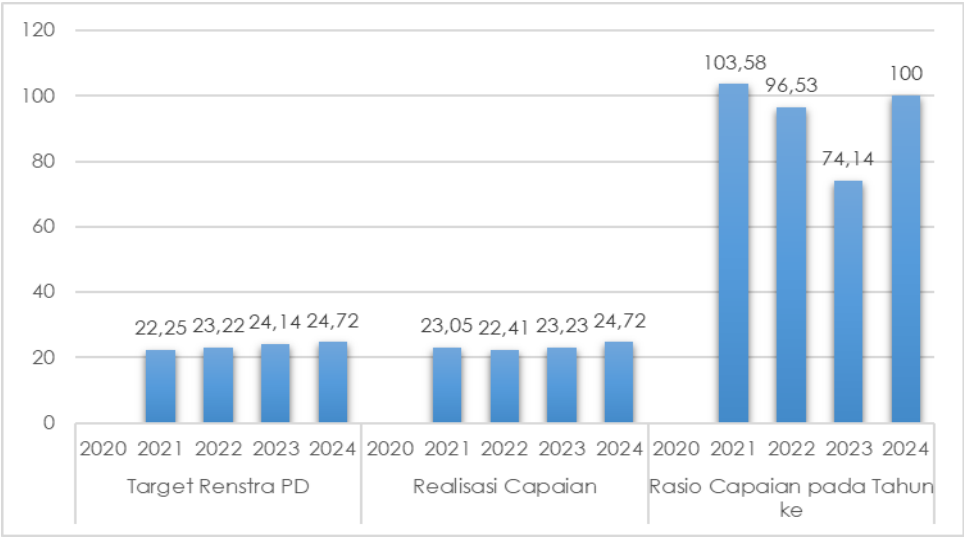
Persentase penduduk berakses air minum termasuk kedalam program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum. Berdasarkan target renstra persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2021 sebesar 22,25 %, pada tahun 2022 persentase penduduk berakses air minum mengalami peningkatan sebesar 0,97% menjadi 23,22%, pada tahun 2023 persentase penduduk berakses air minum mengalami peningkatan sebesar 0,92% menjadi 24,24 % dan pada tahun 2024 persentase penduduk berakses air minum mengalami peningkatan sebesar 0,58% menjadi 24,72 %.



Berdasarkan realisasi capaian persentase penduduk berakses air minum tahun 2021 sebesar 23,05%, pada tahun 2022 persentase penduduk berakses air minum mengalami penurunan sebesar 0,64 % menjadi 22,41%, tahun 2023 persentase penduduk berakses air minum mengalami peningkatan sebesar 0,82% menjadi 23,23%, pada tahun 2024 persentase penduduk berakses air minum mengalami peningkatan sebesar 1,49% menjadi 24,72%.

Berdasarkan rasio capaian persentase penduduk berakses air minum tahun 2021 sebesar 103,58%, pada tahun 2022 persentase penduduk berakses air minum mengalami penurunan sebesar 7,05% menjadi 96,53%, pada tahun 2023 persentase penduduk berakses air minum mengalami penurunan sebesar 22,39% menjadi 74,14% dan pada tahun 2024 persentase penduduk berakses air minum mengalami peningkatan sebesar 25,86% menjadi 100%.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase penduduk berakses air minum dapat dilihat pada gambar 2.20.



Gambar 2.20
Grafik Persentase Penduduk Berakses Air Minum

9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

a. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Berdasarkan target renstra cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada tahun 2021 sebesar 33,19%, pada tahun 2022 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan sebesar 3,53% menjadi 36,72%, pada tahun 2023 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan sebesar 3,51% menjadi 40,23% sedangkan tahun 2024 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan sebesar 3,52% menjadi 43,75%.

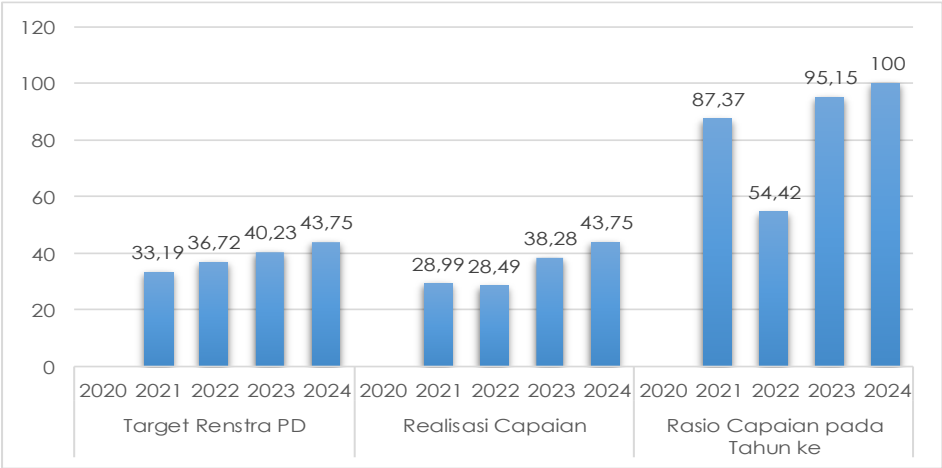
Berdasarkan realisasi capaian cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU tahun 2021 sebesar 28,99%, pada tahun 2022 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mengalami penurunan sebesar 0,5% menjadi 28,49%, tahun 2023 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan sebesar 9,79% menjadi 38,28% dan pada tahun



2024 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan sebesar 5,47% menjadi 43,75%.

Berdasarkan rasio capaian cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada tahun 2021 sebesar 87,37%, pada tahun 2022 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mengalami penurunan sebesar 32,95% menjadi 54,42%, pada tahun 2023 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan sebesar 40,73% menjadi 95,15% dan pada tahun 2024 cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU mengalami peningkatan sebesar 4,85% menjadi 100%.

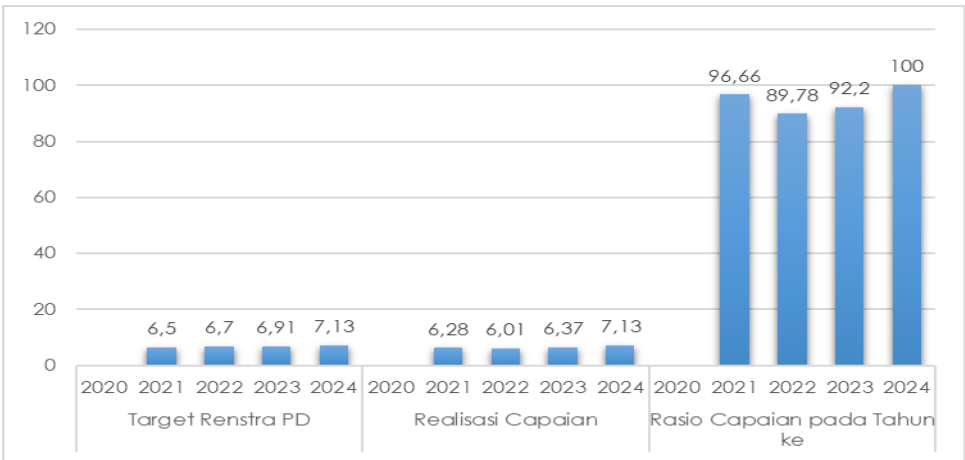
Untuk lebih jelasnya mengenai cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dapat dilihat pada gambar 2.21.



Gambar 2.21
Grafik Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman Yang Didukung Dengan PSU

b. Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum

Berdasarkan target renstra jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum tahun 2021 sebesar 6,5%, pada tahun 2022 jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum mengalami peningkatan sebesar 0,2% menjadi 6,7%, pada tahun 2023 jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum mengalami peningkatan sebesar 0,21% menjadi 6,91% dan pada tahun 2024 jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum mengalami peningkatan sebesar 0,22% menjadi 7,13%. Berdasarkan realisasi capaian jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum tahun 2021 sebesar 6,28%, pada tahun 2022 jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum mengalami penurunan sebesar 0,27% menjadi 6,01%, tahun 2023 jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum mengalami peningkatan sebesar 0,36 % menjadi 6,37%. Berdasarkan rasio capaian jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum tahun 2024 sebesar 96,66 %, pada tahun 2022 jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum mengalami penurunan sebesar 6,88% menjadi 89,78%, pada tahun 2023 jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum mengalami peningkatan sebesar 2,42 % menjadi 92,2% dan pada tahun 2024 jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum mengalami peningkatan sebesar 7,8 % menjadi 100%. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah ketersediaan lahan pemakaman umum dapat dilihat pada gambar 2.22.



Gambar 2.22
Grafik Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum

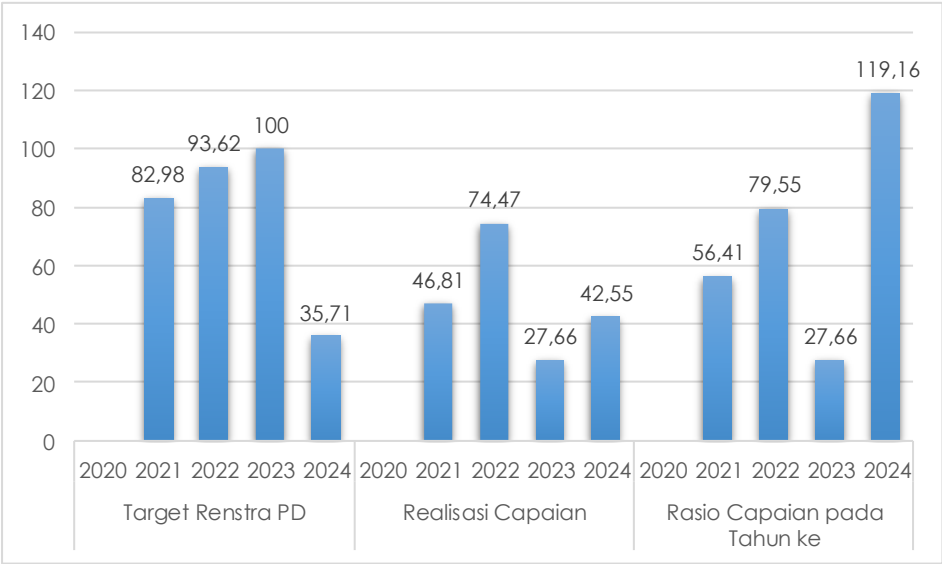
10. Program Penataan Bangunan Gedung

a. Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi

Berdasarkan target renstra persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi pada tahun 2021 sebesar 82,98%, pada tahun 2022 persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami peningkatan sebesar 10,64% menjadi 93,62%, pada tahun 2023 persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami peningkatan sebesar 6,38% menjadi 100%, sedangkan tahun 2024 persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami penurunan sebesar 64,29% menjadi 35,71%.

Berdasarkan realisasi capaian persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi pada tahun 2021 sebesar 46,81%, pada tahun 2022 persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami peningkatan sebesar 27,66% menjadi 74,47%, pada tahun 2023 persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami penurunan sebesar 46,81% menjadi 27,66% dan pada tahun 2024 persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami peningkatan sebesar 14,89% menjadi 42,55%

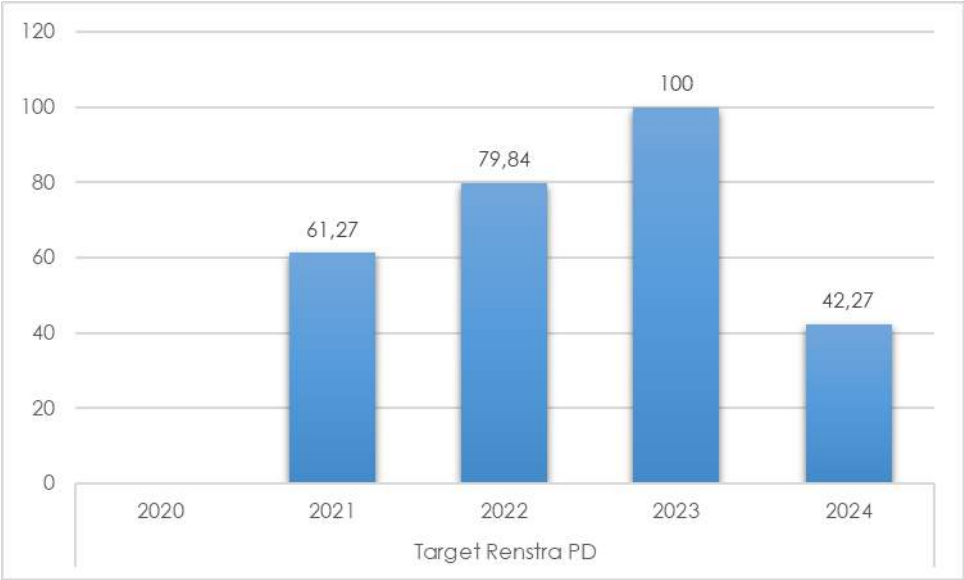
Berdasarkan rasio capaian persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi pada tahun 2022 sebesar 56,41%, pada tahun 2022 persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami peningkatan sebesar 23,14% menjadi 79,55%, pada tahun 2023 persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami penurunan sebesar 51,89% menjadi 27,66% dan pada tahun 2024 persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami peningkatan sebesar 91,5% menjadi 119,16 %. Untuk lebih jelasnya mengenai persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi dapat dilihat pada gambar 2.23.



Gambar 2.23
Grafik Persentase Ketersediaan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik Dan Berfungsi

b. Persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik

Berdasarkan target renstra persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik pada tahun 2021 sebesar 61,27%, pada tahun 2022 persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 18,57% menjadi 79,84%, pada tahun 2023 persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 20,16 % menjadi 100% dan pada tahun 2024 persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik mengalami penurunan sebesar 57,73% menjadi 42,27%. Untuk lebih jelasnya mengenai persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik dapat dilihat pada gambar 2.24.



Gambar 2.24
Grafik Persentase Sarana Dan Prasarana Pendidikan Yang Berkualitas Baik



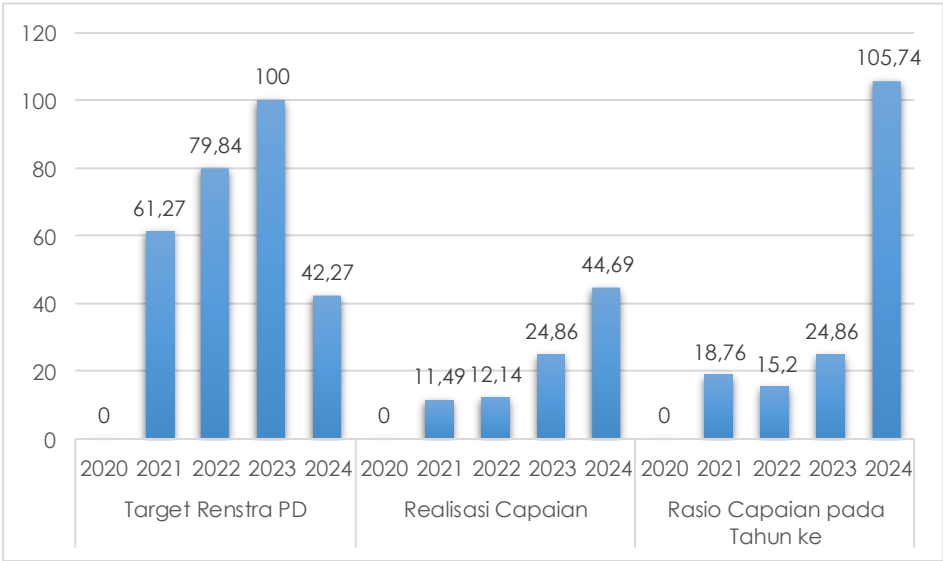
c. **Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik**

Berdasarkan target renstra persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik pada tahun 2021 sebesar 61,27%, pada tahun 2022 persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 18,57% menjadi 79,84%, pada tahun 2023 persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 20,16% menjadi 100%, dan pada tahun 2024 persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik mengalami penurunan sebesar 57,73% menjadi 42,27%.

Berdasarkan realisasi capaian persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik tahun 2021 sebesar 11,49%, pada tahun 2022 persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 0,65% menjadi 12,14%, pada tahun 2023 persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 12,72% menjadi 24,86% dan pada tahun 2024 persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 19,83% menjadi 44,69%

Berdasarkan rasio capaian persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik pada tahun 2021 sebesar 18,76%, pada tahun 2022 persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik mengalami penurunan sebesar 3,56 % menjadi 15,2%, pada tahun 2023 persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 9,66% menjadi 24,86% dan pada tahun 2024 persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 80,88% menjadi 105,74%.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik dapat dilihat pada gambar 2.25.



Gambar 2.25
Grafik Persentase Gedung Pendidikan Yang Berkualitas Baik

11. Program Pengelolaan Pendidikan

a. **Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik**

Berdasarkan target renstra persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 66,67 %, pada tahun 2022 persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 16,66 % menjadi 83,33%, pada tahun 2023 persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar

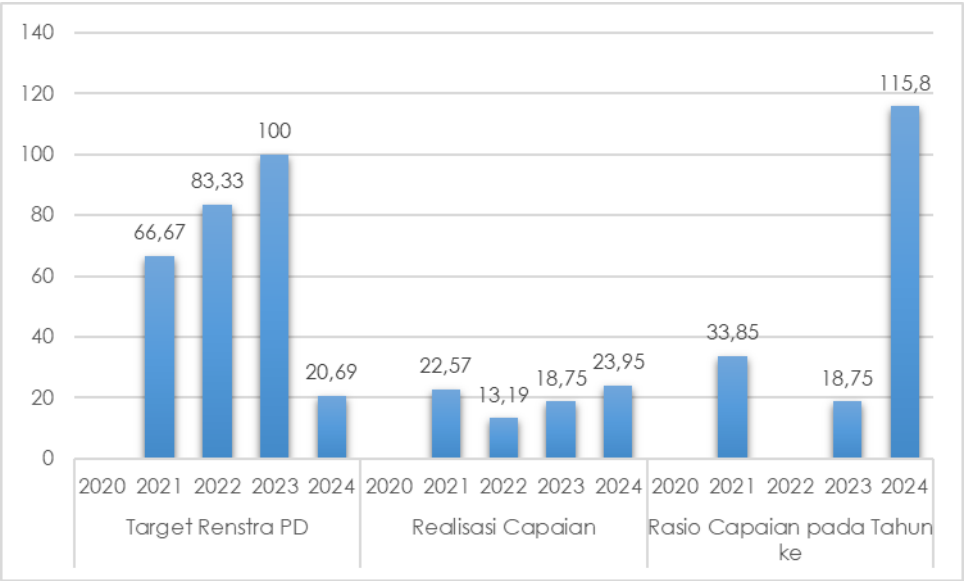


dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 16,67% menjadi 100% dan pada tahun 2024 persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik mengalami penurunan sebesar 79,31% menjadi 20,69%.

Berdasarkan realisasi capaian persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 22,57%, pada tahun 2022 persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik mengalami penurunan sebesar 9,38% menjadi 13,19%, pada tahun 2023 persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 5,56% menjadi 18,75% dan pada tahun 2024 persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 5,2 % menjadi 23,95%.

Berdasarkan rasio capaian persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik tahun 2021 sebesar 33,85%, persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik tahun 2023 sebesar 18,75% dan persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 97,05% menjadi 115,8%.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik dapat dilihat pada gambar 2.26.



Gambar 2.26
Grafik Persentase Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar Dalam Kondisi Baik

b. Persentase bangunan SMPN disetiap Kelurahan dalam Kondisi Baik

Berdasarkan target renstra persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 57,14%, pada tahun 2022 persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 19,05% menjadi 76,19%, pada tahun 2023 persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 23,81% menjadi 100% dan pada tahun 2024 persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik mengalami penurunan sebesar 63,89% menjadi 36,11%.

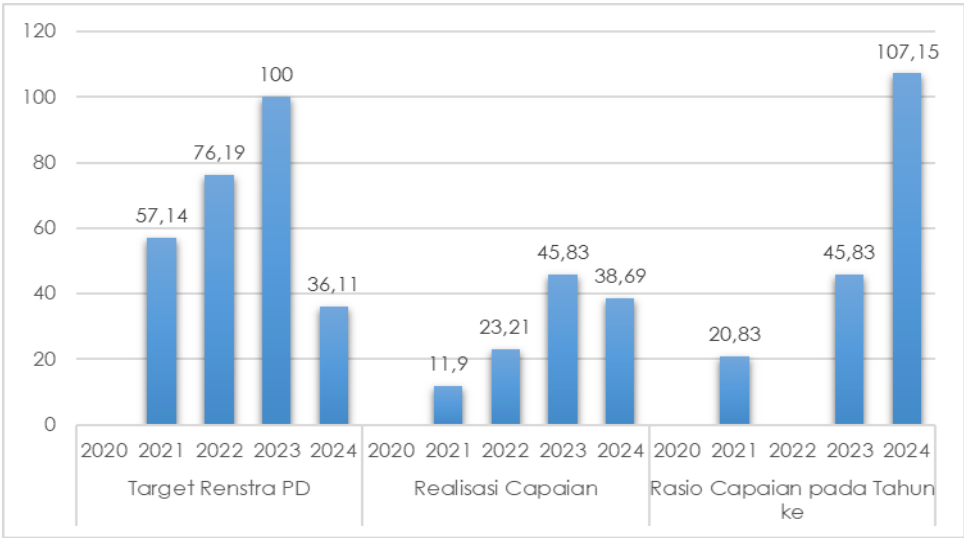
Berdasarkan realisasi capaian persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 11,9%, pada tahun 2022 persentase bangunan



SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 11,31% menjadi 23,21%, pada tahun 2023 persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 22,62% menjadi 45,83% dan pada tahun 2024 persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik mengalami penurunan sebesar 7,14 % menjadi 38,69%.

Berdasarkan rasio capaian persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik tahun 2021 sebesar 20,83%, pada tahun 2023 persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik sebesar 45,83% dan pada tahun persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik sebesar 107,15%.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase bangunan SMPN disetiap kelurahan dalam kondisi baik dapat dilihat pada gambar 2.27.



Gambar 2.27
Grafik Persentase Bangunan SMPN Disetiap Kelurahan Dalam Kondisi Baik

c. **Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik**

Berdasarkan target renstra persentase sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam kondisi baik pada tahun 2021 sebesar 60%, pada tahun 2022 persentase sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 20% menjadi 80%, pada tahun 2023 persentase sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam kondisi baik mengalami peningkatan sebesar 20% menjadi 100% dan pada tahun 2024 persentase sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam kondisi baik mengalami penurunan sebesar 30% menjadi 70%.

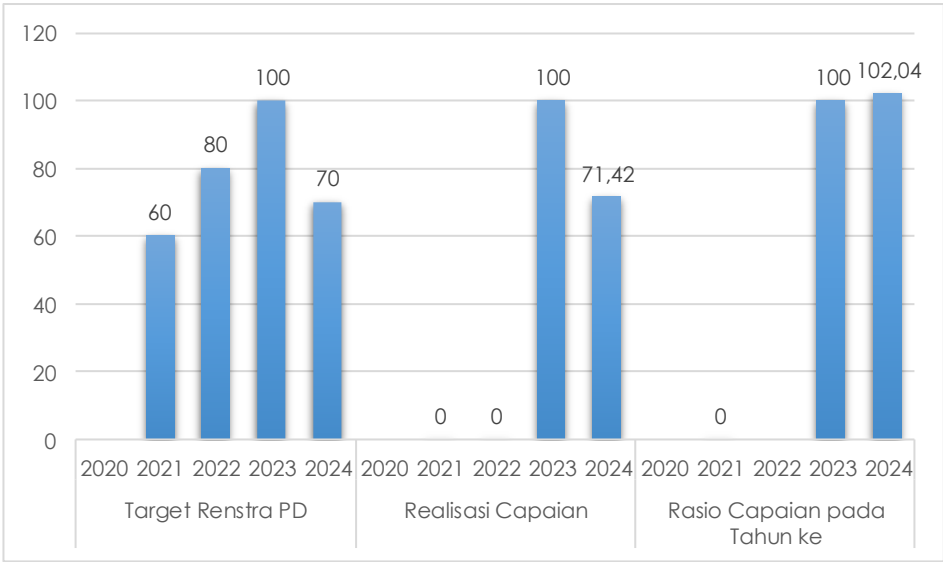
Berdasarkan realisasi capaian persentase sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam kondisi baik pada tahun 2023 sebesar 100% dan persentase sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam kondisi baik pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 28,58% menjadi 71,42%

Berdasarkan rasio capaian persentase sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam kondisi baik pada tahun 2023 sebesar 100% dan persentase sarana dan



prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam kondisi baik pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,04% menjadi 102,04%.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dalam kondisi baik dapat dilihat pada gambar 2.28.

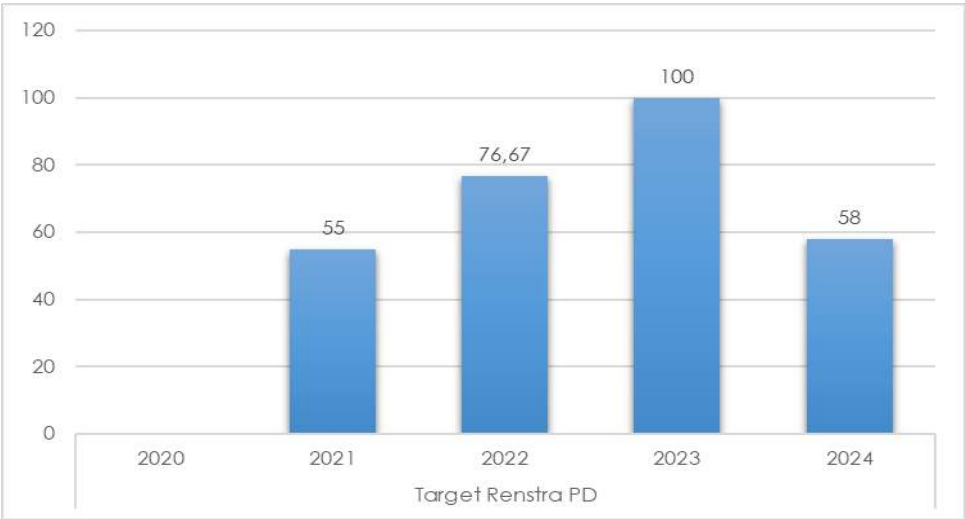


Gambar 2.28
Persentase Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Dalam Kondisi Baik

d. Persentase sarana dan prasarana Kesehatan yang berkualitas baik

Berdasarkan target renstra persentase sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik pada tahun 2021 sebesar 55%, pada tahun 2022 persentase sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 21,67 % menjadi 76,67%, pada tahun 2023 persentase sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 23,33% menjadi 100% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 42% menjadi 58%.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik dapat dilihat pada gambar 2.29.



Gambar 2.29
Grafik Persentase Sarana Dan Prasarana Kesehatan Yang Berkualitas Baik



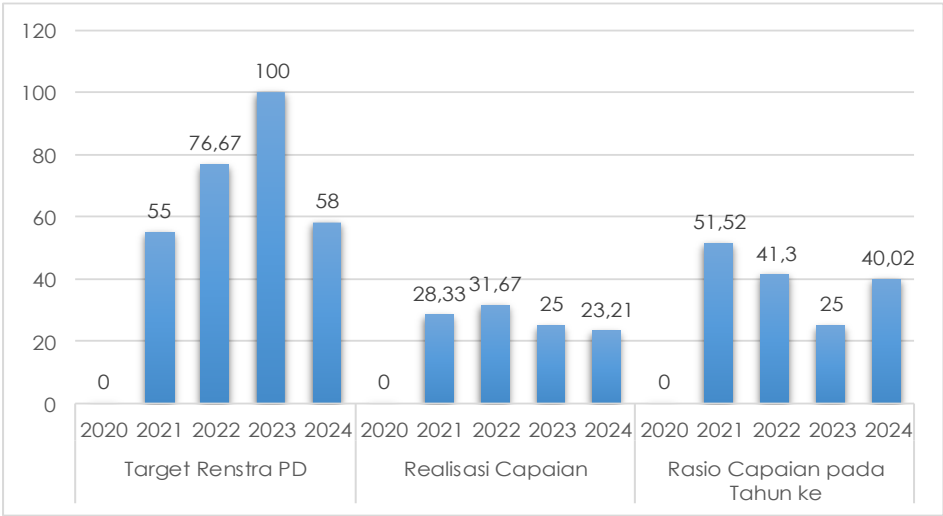
e. **Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik**

Berdasarkan target renstra persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik pada tahun 2021 sebesar 55%, pada tahun 2022 persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 21,67% menjadi 76,67%, pada tahun 2023 persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 23,33% menjadi 100% dan pada tahun 2024 persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik mengalami penurunan sebesar 42% menjadi 58%.

Berdasarkan realisasi capaian persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik pada tahun 2021 sebesar 28,33%, pada tahun 2022 persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 3,34% menjadi 31,67%, pada tahun 2023 persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik mengalami penurunan sebesar 6,67% menjadi 25% dan pada tahun 2024 persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik mengalami penurunan sebesar 1,79% menjadi 23,21%.

Berdasarkan rasio capaian persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik pada tahun 2021 sebesar 51,52 %, pada tahun 2022 persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik mengalami penurunan sebesar 10,22% menjadi 41,3%, pada tahun 2023 persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik mengalami penurunan sebesar 16,3% menjadi 25% dan pada tahun 2024 persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik mengalami peningkatan sebesar 15,02% menjadi 40,02%.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik dapat dilihat pada gambar 2.39.



Gambar 2.30
Grafik Persentase Gedung Kesehatan Yang Berkualitas Baik

12. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

a. **Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obsterti neonatal emergency* dasar (Poned)**

Berdasarkan target renstra persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned) pada tahun 2021 sebesar 50%, pada tahun 2022 persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan

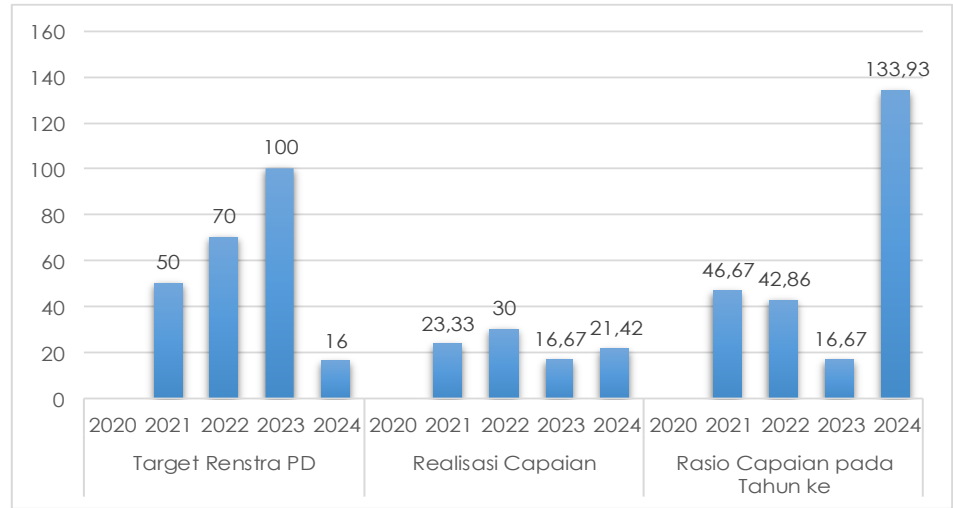


obstertu neonatal emergency dasar (Poned) mengalami peningkatan sebesar 20% menjadi 70%, pada tahun 2023 persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obstertu neonatal emergency* dasar (Poned) mengalami peningkatan sebesar 30% menjadi 100% dan pada tahun 2024 persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obstertu neonatal emergency* dasar (Poned) mengalami penurunan sebesar 84% menjadi 16%.

Berdasarkan realisasi capaian persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obstertu neonatal emergency* dasar (Poned) pada tahun 2021 sebesar 23,33%, pada tahun 2022 persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obstertu neonatal emergency* dasar (Poned) mengalami peningkatan sebesar 6,67% menjadi 30%, pada tahun 2023 persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obstertu neonatal emergency* dasar (Poned) mengalami penurunan sebesar 13,33% menjadi 16,67% dan pada tahun 2024 persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obstertu neonatal emergency* dasar (Poned) mengalami peningkatan sebesar 4,75% menjadi 21,42%.

Berdasarkan rasio capaian persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obstertu neonatal emergency* dasar (Poned) pada tahun 2021 sebesar 46,67%, pada tahun 2022 persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obstertu neonatal emergency* dasar (Poned) mengalami penurunan sebesar 3,81%, pada tahun 2023 persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obstertu neonatal emergency* dasar (Poned) mengalami penurunan sebesar 26,19% menjadi 16,67% dan pada tahun 2024 persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obstertu neonatal emergency* dasar (Poned) mengalami peningkatan sebesar 117,26% menjadi 133,93%.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan *obstertu neonatal emergency* dasar (Poned) dapat dilihat pada gambar 2.31.



Gambar 2.31
Grafik Persentase Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Pelayanan
Obstertu Neonatal Emergency Dasar (Poned)



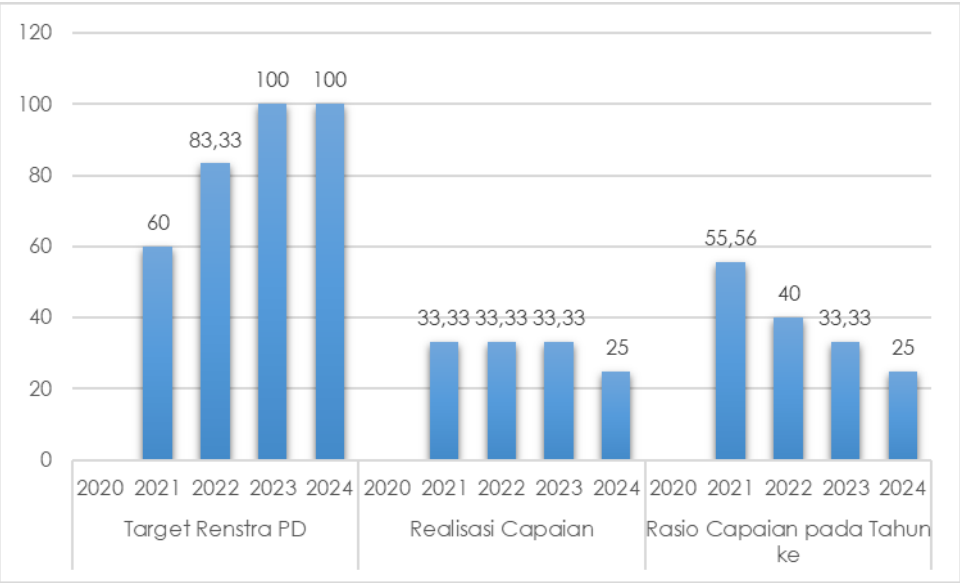
b. Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi

Berdasarkan target renstra persentase ketersediaan gedung RS tipe D pada tahun 2024 dalam kondisi baik dan berfungsi pada tahun 2021 sebesar 60%, pada tahun 2022 persentase ketersediaan gedung RS tipe D pada tahun 2024 dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami peningkatan sebesar 23,33% menjadi 83,33%, pada tahun 2025 persentase ketersediaan gedung RS tipe D pada tahun 2024 dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami peningkatan sebesar 16,67% menjadi 100%, pada tahun 2024 persentase ketersediaan gedung RS tipe D pada tahun 2024 dalam kondisi baik dan berfungsi tidak mengalami peningkatan atau penurunan.

Berdasarkan realisasi capaian persentase ketersediaan gedung RS tipe D pada tahun 2024 dalam kondisi baik dan berfungsi tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebesar 33,33%, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,33% menjadi 25%.

Berdasarkan rasio capaian persentase ketersediaan gedung RS tipe D pada tahun 2024 dalam kondisi baik dan berfungsi pada tahun 2021 sebesar 55,56%, pada tahun 2022 persentase ketersediaan gedung RS tipe D pada tahun 2024 dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami penurunan sebesar 15,56% menjadi 40%, pada tahun 2023 persentase ketersediaan gedung RS tipe D pada tahun 2024 dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami penurunan sebesar 6,67% menjadi 33,44% dan pada tahun 2024 persentase ketersediaan gedung RS tipe D pada tahun 2024 dalam kondisi baik dan berfungsi mengalami penurunan sebesar 8,33% menjadi 25%.

Untuk lebih jelasnya mengenai persentase ketersediaan gedung RS tipe D pada tahun 2024 dalam kondisi baik dan berfungsi dapat dilihat pada gambar 2.32.



Gambar 2.32
Persentase Ketersediaan Gedung RS Tipe D pada tahun 2024
Dalam Kondisi Baik Dan Berfungsi

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel 2.5.



Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
1.	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				70,00	72,00	74,00	66.19										
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			N/A	78,80	80,00	82,00	70.00	N/A	79,23	80	57,19	69,25	N/A	100,55	99,04	69,74	98,92
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat			N/A	92,00	92,50	93,00	90.00	N/A	91,78	93,54	96,63	84,68	N/A	99,76	101,12	103,90	94,09
4.	Optimalisasi Disiplin Aparatur				100	100	100	100		100	100	100		100	100	100		
5.	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				100	100	100	100		100	100	100		100	100	100		
6.	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran				100	100	100	100		100	100	100		100	100	100		
7.	Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur				100	100	100	100		100	100	100		100	100	100		
8.	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				100	100	100	100		100	100	100		100	100	100		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah																		
9.	Persentase Peningkatan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran				46,71	52,36	57,45	39,48										
10.	Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran			N/A	46,71	52,36	57,45	39,48	N/A	21,66	28,49	42,40	36.21	N/A	46,36	54,42	73,81	91.72
11.	Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak							99.58					99,63					100,05

Paraf Koordinasi	
Kepala Disperkimtan	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum Setda	



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
12.	Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman							2.84					1,8					63,38
Program Pengembangan Perumahan																		
13.	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau				13,30	15,97	18,65	6.26		5,99	6,01	23,60	6,26		45,07	37,62	126,59	100
14.	Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota				100	100	100	100		0	100	100	100		0	100	100	100
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh																		
15.	Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikasawan perkotaan							79.84					74					92,69
Program Kawasan Permukiman																		
16.	Persentase Luasan Permukiman kumuh dikasawan perkotaan				66,76	84,41	100	1,64		68,32	68,32	100	1,64		102,33	80,93	100	100
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan																		
17.	Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot				100	100	100	33.33		0	0	N/A	0		0	0	N/A	0
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan																		
18.	Persentase Pemenuhan pengadaan tanah				63,00	81,00	100	38.93		16,55	9,50	19,38	33		26,28	11,72	19,38	84,77
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																		
19.	Persentase Penduduk Berakses Air Minum				22,25	23,22	24,14	24.72		23,05	22,41	23,23	24,72		103,58	96,53	74,14	100
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)																		
20.	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU				33,19	36,72	40,23	43.75		28,99	28,49	38,28	43,75		87,37	54,42	95,15	100

Paraf Koordinasi	
Kepala Disperkimtan	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum Setda	



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
21.	Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum				6,50	6,70	6,91	7.13		6,28	6,01	6,37	7,13		96,66	89,78	92,20	100
Program Penataan Bangunan Gedung																		
22.	Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi				82,98	93,62	100	35.71		46,81	74,47	27,66	42,55		56,41	79,55	27,66	119,16
23.	Persentase sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik				61,27	79,84	100	42.27										
24.	Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik			N/A	61,27	79,84	100	42.27	N/A	11,49	12,14	24,86	44,69	N/A	18,76	15,20	24,86	105,74
Program Pengelolaan Pendidikan																		
25.	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik				66,67	83,33	100	20.69		22,57	13,19	18,75	23,95		33,85		18,75	115,80
26.	Persentase bangunan SMPN disetiap Kelurahan dalam Kondisi Baik				57,14	76,19	100	36.11		11,90	23,21	45,83	38,69		20,83		45,83	107,15
27.	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik				60,00	80,00	100	70.00		0	0	100	71,42		0		100	102,04
28.	Persentase sarana dan prasarana Kesehatan yang berkualitas baik				55,00	76,67	100	58.00										
29.	Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik			N/A	55,00	76,67	100	58.00	N/A	28,33	31,67	25,00	23,21	N/A	51,52	41,30	25,00	40,02
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat																		
30.	Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)				50,00	70,00	100	16,00		23,33	30,00	16,67	21,42		46,67	42,86	16,67	133,93
31.	Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun				60,00	83,33	100	100		33,33	33,33	33,33	25,00		55,56	40,00	33,33	25,00

Paraf Koordinasi	
Kepala Disperkimtan	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum Setda	



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	2023 dalam kondisi baik dan berfungsi																	

Sumber : LKIP 2021, LKIP 2022, LKIP 2023 dan LKIP 2024

Paraf Koordinasi	
Kepala Disperkimtan	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum Setda	



Realisasi capaian persentase peningkatan kualitas pelayanan publik tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 22,81 % menjadi 57,19 % dan mengalami peningkatan kembali sebesar 12,06 % menjadi 69,25%.

Realisasi capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 sebesar 96,63 % dan mengalami penurunan sebesar 11,95 % menjadi 84,68 %. Dilihat dari target renstra tahun 2024 indeks kepuasan masyarakat sebesar 90.00%, dapat dilihat bahwa realisasi capaian tahun 2024 belum mencapai target renstra tahun 2024.

Secara umum, capaian kinerja Disperkimtan Kota Bekasi dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya kemajuan signifikan pada aspek fisik dan pelayanan, namun juga mencerminkan tantangan dalam aspek perencanaan indikator dan target tahunan yang belum sepenuhnya lengkap. Ketidakterisian target pada beberapa indikator menyebabkan evaluasi capaian tidak dapat dilakukan secara utuh. Oleh karena itu, perencanaan indikator dan target di Renstra 2025–2029 perlu disusun secara lebih komprehensif dan realistis, agar kinerja perangkat daerah dapat terukur dan akuntabel.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Disperkimtan meliputi:

1. **Masyarakat Kota Bekasi**, khususnya:
 - a. Layanan pemakaman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - b. Warga yang tinggal di kawasan kumuh;
 - c. Penghuni rusunawa; dan
 - d. Pengguna dan air limbah domestik.
2. **Perangkat Daerah** (dalam hal penyediaan data, koordinasi RTRW/RDTR, dan penataan bangunan gedung milik pemerintah).
3. **Pengembang, asosiasi perumahan, dan pihak swasta** yang bermitra dalam penyediaan sarana dan prasarana perumahan.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja lima tahunan serta dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disperkimtan Tahun 2024, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menghambat optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, meliputi:

1. Belum adanya database yang menampilkan data sarana dan prasarana pendidikan secara berkala dan *update* dan terbatasnya pendanaan.
2. Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan pembangunan USB untuk per kelurahan.
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan yang representatif;
4. Banyaknya sarana pendidikan, sarana yang rusak;
5. Pembangunan belum mencapai target dikarenakan masih terdapat Kelurahan di Kota Bekasi yang belum memiliki fasilitas Puskesmas yang baik;



6. Keterbatasan informasi dari Dinas kesehatan terkait Puskesmas yang butuh ditingkatkan statusnya menjadi PONED;
7. Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan untuk peningkatan Puskesmas menjadi PONED;
8. Sedikitnya jumlah usulan peningkatan RSUD Type C di masing-masing RSUD Type D;
9. Belum seluruh wilayah kecamatan di Kota Bekasi memiliki RSUD Type D;
10. Belum tersedianya lahan di beberapa kecamatan untuk pembangunan RSUD Type D;
11. Realisasi capaian persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik tahun 2024 sebesar 23,21 % belum mencapai target renstra yaitu sebesar 58%;
12. Akses terhadap air minum perpipaan masih dibawah target Nasional;
13. Perlunya pendataan wilayah kumuh ulang dan Anggaran yang kurang maksimal;
14. Belum tercapainya target Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikawasan perkotaan Kota Bekasi tahun 2024 sebesar 79,84 % sedangkan realisasi capaian persentase luasan permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikawasan perkotaan sebesar 74% perlu adanya peningkatan untuk mencapai target renstra;
15. Belum terdatanya secara maksimal rumah yang sudah dilakukan penyedotan tanki septiknya;
16. Pelayanan IPLT Sumur Batu untuk penanganan pengolahan limbah domestik masih rendah;
17. Realisasi capaian persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi aman tahun 2024 belum mencapai target renstra yaitu sebesar 1,8 % sedangkan target renstra sebesar 2,84%;
18. Realisasi capaian cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran pada program pengelolaan dan pengembangan system air limbah belum mencapai target renstra yaitu sebesar 36,21 % sedangkan target renstra sebesar 39,48%;
19. Penyediaan perumahan untuk masyarakat terkendala ketersediaan lahan yang makin sulit didapatkan;
20. Potensi konflik kepemilikan lahan di Kota Bekasi masih terus terjadi berupa tumpang tindih hak atas tanah;
21. Belum seluruh bidang tanah terdaftar/bersertifikat sehingga mudah memicu konflik dan sengketa tanah, terutama ketika direncanakan atau akan digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
22. Belum optimalnya dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
23. Belum terwujudnya kelembagaan yang menerapkan prinsip *good governance*;
24. Kurangnya sosialisasi biaya / tarif layanan melalui website maupun media sosial yang lain;
25. Kurang terpublikasinya persyaratan pelayanan dengan jelas;
26. Kurangnya sosialisasi alur pelayanan di UPTD;
27. Belum tercukupinya kebutuhan operasional penunjang pegawai Aparat;
28. Reaslisasi capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2024 sebesar 69,25% belum mencapai target renstra yaitu sebesar 70.00%;



29. Realisasi capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 sebesar 84,68% belum mencapai target renstra yaitu 90,00%; dan
30. Pengelolaan infrastruktur perkotaan memerlukan peningkatan kolaborasi dengan wilayah sekitar.

2.2.2 Isu Strategis

Permasalahan terkait perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan merupakan persoalan yang kompleks dan dinamis. Kompleksitas persoalan tidak hanya menyangkut variable masalah yang luas, namun juga menyangkut optimalisasi integrasi dan sinergitas lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan perencanaan dan pengendalian kebijakan, strategi dan program agar lebih menyentuh akar permasalahan yang mendasar. Sementara, sisi dinamis dari persoalan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan adalah terkait bahwa persoalan tersebut memiliki kecenderungan untuk meningkat, dengan faktor penyebab yang beragam dari tahun ke tahun sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif, tidak hanya penanganan masalahnya semata namun juga penanganan yang bersifat antisipatif atas potensi permasalahan yang dapat muncul di kemudian hari.

Isu strategis Disperkimtan Kota Bekasi dirumuskan dengan mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2025–2029, khususnya Misi 1 serta arah kebijakan pembangunan kota layak huni dan pelayanan publik perkotaan dan keterkaitan isu strategis Kota Bekasi dengan rekomendasi KLHS RPJMD Tahun 2025-2029.

Isu-isu berikut perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan yaitu:

1. **Peningkatan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur permukiman dan PSU dasar** di wilayah perkotaan dan kawasan padat penduduk.
2. **Percepatan penanganan kawasan kumuh berbasis kawasan prioritas**, termasuk integrasi dengan program nasional.
3. **Penguatan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi aman**, termasuk optimalisasi UPTD PALD dan pembangunan infrastruktur IPAL komunal.
4. **Peningkatan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)** melalui bantuan pembangunan rumah dan intervensi rumah tidak layak huni.
5. **Reformasi tata kelola pertanahan dan aset daerah** melalui penertiban legalitas, pemutakhiran data digital, dan penyusunan database berbasis spasial.
6. **Peningkatan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi internal**, dengan fokus pada peningkatan AKIP, penguatan evaluasi kinerja, dan survei kepuasan layanan.
7. **Adaptasi terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan permukiman ramah lingkungan**, terutama di wilayah dengan risiko banjir dan keterbatasan ruang terbuka hijau.



Tabel 2.6
Pemetaan Isu Strategis Kota Bekasi

Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional	
1. Belum adanya database yang menampilkan data sarana dan prasarana pendidikan secara berkala dan update dan terbatasnya pendanaan 2. Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan pembangunan USB untuk per kelurahan 3. Belum terpenuhinya Sarana dan Prsarana Kesehatan yang Representatif 4. Banyaknya sarana pendidikan, sarana yang rusak 5. Pembangunan belum mencapai target dikarenakan masih terdapat Kelurahan di Kota Bekasi yang belum memiliki fasilitas Puskesmas yang baik 6. Keterbatasan informasi dari Dinas kesehatan terkait Puskesmas yang butuh ditingkatkan statusnya menjadi PONED 7. Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan untuk peningkatan Puskesmas menjadi PONED 8. Sedikitnya jumlah usulan peningkatan RSUD Type C di masing-masing RSUD Type D 9. Belum seluruh wilayah kecamatan di Kota Bekasi memiliki RSUD Type D 10. Belum tersedianya lahan di beberapa kecamatan untuk pembangunan RSUD Type D 11. Realisasi capaian persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik tahun 2024 sebesar 23,21 % belum mencapai target renstra yaitu sebesar 58% 12. Akses terhadap air minum perpipaan masih dibawah target Nasional	1. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tanggung dan berkelanjutan 2. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 3. menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk 4. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan			layanan infrastruktur dasar	Peningkatan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur permukiman dan PSU dasar di wilayah perkotaan dan kawasan padat penduduk
1. Perlunya pendataan wilayah kumuh ulang dan			pergeseran struktur	kemiskinan dan	Percepatan penanganan kawasan

Paraf Koordinasi

Kepala Disperkimtan

Kepala Bapelitbangda

Kabag Hukum Setda



Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional	
Anggaran yang kurang maksimal 2. Belum tercapainya target Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikawasan perkotaan Kota Bekasi tahun 2024 sebesar 79,84 % sedangkan realisasi capaian Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikawasan perkotaan sebesar 74% perlu adanya peningkatan untuk mencapai target renstra			kelas masyarakat	ketimpangan	kumuh berbasis kawasan prioritas, termasuk integrasi dengan program nasional
1. Belum terdatanya secara maksimal rumah yang sudah dilakukan penyedotan tanki septiknya 2. Pelayanan IPLT Sumur Batu untuk penanganan pengolahan limbah domestik masih rendah 3. Realisasi capaian persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi aman tahun 2024 belum mencapai target renstra yaitu sebesar 1,8 % sedangkan target renstra sebesar 2,84% 4. Realisasi capaian cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran pada program pengelolaan dan pengembangan system air limbah belum mencapai target renstra yaitu sebesar 36,21 % sedangkan target renstra sebesar 39,48%				layanan infrastruktur dasar	Penguatan sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi aman, termasuk optimalisasi UPTD PALD dan pembangunan infrastruktur IPAL komunal
Penyediaan perumahan untuk masyarakat terkendala ketersediaan lahan yang makin sulit didapatkan			pergeseran struktur kelas masyarakat	kemiskinan dan ketimpangan	Peningkatan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui bantuan pembangunan rumah dan intervensi rumah tidak layak huni
1. Potensi konflik kepemilikan lahan di Kota Bekasi masih terus terjadi berupa tumpang tindih hak atas tanah 2. Belum seluruh bidang tanah terdaftar/bersertifikat sehingga mudah memicu konflik dan sengketa tanah, terutama ketika		demografi global	kualitas SDM	Tata kelola pemerintahan	Reformasi tata kelola pertanahan dan aset daerah melalui penertiban legalitas, pemutakhiran data digital, dan penyusunan database berbasis spasial

Paraf Koordinasi	
Kepala Disperkimtan	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum Setda	



Permasalahan	Isu KLHS Yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional	
direncanakan atau akan digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum					
1. Belum optimalnya dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi akuntabilitas kinerja internal 2. Belum terwujudnya kelembagaan yang menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> . 3. Kurangnya sosialisasi biaya / tarif layanan melalui website maupun media sosial yang lain 4. Kurang terpublikasinya persyaratan pelayanan dengan jelas 5. Kurangnya sosialisasi alur pelayanan di UPTD 6. Belum tercukupinya kebutuhan operasinal penunjang pegawai Aparat 7. Reaslisasi capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2024 sebesar 69,25% belum mencapai target renstra yaitu sebesar 70.00% 8. Realisasi capaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 sebesar 84,68% belum mencapai target renstra yaitu 90.00%			Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah		Peningkatan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi internal, dengan fokus pada peningkatan AKIP, penguatan evaluasi kinerja, dan survei kepuasan layanan
Pengelolaan infrastruktur perkotaan memerlukan peningkatan kolaborasi dengan wilayah sekitar		Dampak perubahan iklim global	krisis lingkungan	layanan infrastruktur dasar	Adaptasi terhadap isu perubahan iklim dan pembangunan permukiman ramah lingkungan, terutama di wilayah dengan risiko banjir dan keterbatasan ruang terbuka hijau

Sumber: dokumen RPJMD Tahun 2025–2029, KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Paraf Koordinasi	
Kepala Disperkimtan	
Kepala Bapelitbangda	
Kabag Hukum Setda	



BAB III

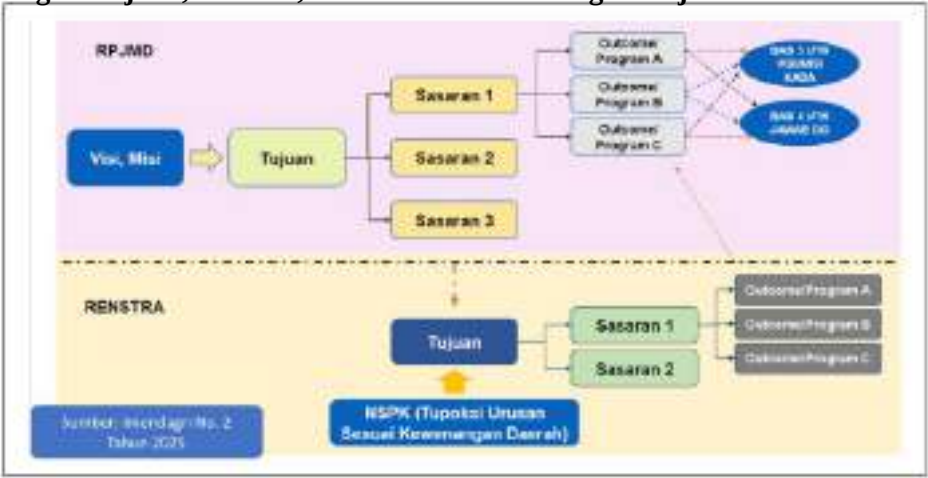
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DISPERKIMTAN KOTA TAHUN 2025-2029

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mendefinisikan Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Kemudian sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, mendeskripsikan bahwa Tujuan Renstra PD adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD. Untuk sasaran Renstra PD adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi, tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) tahun 2025-2029. Sasaran daerah tersebut didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang difokuskan untuk mempertajam pelaksanaan visi, misi Wali Kota Bekasi dan meletakkan kerangka prioritas dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Gambar 3.1
Hubungan Tujuan, Sasaran, Outcome RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra PD



1. Visi Kota Bekasi

Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang akan diarahkan ke depannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bekasi. Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**



Visi ini memiliki kandungan makna bahwa “Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera”. Kata “yang Semakin” menunjukkan semangat pembaruan untuk menjadikan kondisi Kota Bekasi yang lebih maju dari kondisi sebelumnya. Apa yang sudah baik, dilanjutkan. Apa yang tidak baik, dihilangkan. Apa yang masih kurang, diperbaiki. Apa yang masih belum tertangani, dilengkapi. Apa yang belum sempurna, disempurnakan. Hal ini tentunya sejalan dengan tahap pertama RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 yang menekankan pada penguatan modalitas atau sumber daya yang dimiliki oleh Kota Bekasi.

Kata “Nyaman” menunjukkan gambaran keadaan yang kondusif kehidupan perkotaannya, aman terlindungi bagi warganya, asri suasana lingkungan kotanya, tenang beraktivitas kesehariannya, terjamin bebas dalam berekspresi, dan guyub rukun saling menghargai dalam kehidupan beragama dan berbudayanya di Kota Bekasi.

Kata “Sejahtera” menunjukkan gambaran kondisi dan taraf kehidupan warga kotanya, dalam arti cukup “sandang, pangan, dan papan” serta sehat, cerdas, dan berpendapatan yang layak untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Dalam rumusan dan penjelasan visi di atas, dijiwai dan disemangati dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut antara lain berke-Tuhan-an, berwawasan kebangsaan, berkeadilan rakyat, kebersamaan (gotong royong), keterbukaan, inovatif dan kreatif.

2. Misi Kota Bekasi

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut, meliputi:

a. **Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai**

Misi-1 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pelayanan publik yang semakin memuaskan masyarakat Kota Bekasi, terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pelayanan lainnya baik transportasi, persampahan, air bersih, penyehatan lingkungan serta infrastruktur pendukungnya. Misi pertama ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mewujudkan pembangunan infrastruktur modern dan merata; (2) mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas; dan (3) mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

b. **Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan.**

Misi-2 ini dilakukan untuk memastikan lingkungan kehidupan perkotaan yang nyaman dalam mendukung fase tumbuh- kembang generasi anak Indonesia yang berkualitas: sehat, cerdas, berakhlak mulia, bebas berekspresi, berbudi pekerti, mandiri, dan cinta NKRI. Misi kedua ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, kreatif, dan berprestasi; dan (2) mewujudkan kehidupan masyarakat berbudaya, harmoni, dan peduli lingkungan.



c. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi

Misi-3 ini dilakukan untuk menjamin tersedianya dan terciptanya lapangan kerja yang luas bagi generasi milenial, generasi-Z, dan usia produktif lainnya yang lebih responsif dan berdaya saing terhadap kebutuhan pasar terutama di sektor jasa dan perdagangan perkotaan. Misi ketiga ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kreativitas, inovasi, serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi kelompok usia produktif lintas generasi, sehingga mampu berperan dan berkontribusi dalam pembangunan.

d. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat

Misi-4 ini dilakukan untuk menarik para investor di Kota Bekasi, baik dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai kemudahan perizinan, akses data potensi dan insentif lainnya yang memudahkan dan memenuhi rasa keadilan dunia usaha khususnya yang turut berkontribusi mendorong berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara proporsional. Misi keempat ini berkaitan dengan kepentingan: (1) mengembangkan perekonomian dengan penguatan UMKM, koperasi, dan BUMD, serta penguatan daya tarik investasi, yang berkontribusi pada peningkatan nilai PDRB; dan (2) penyederhanaan birokrasi dan kepastian hukum untuk menjamin iklim investasi.

e. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren

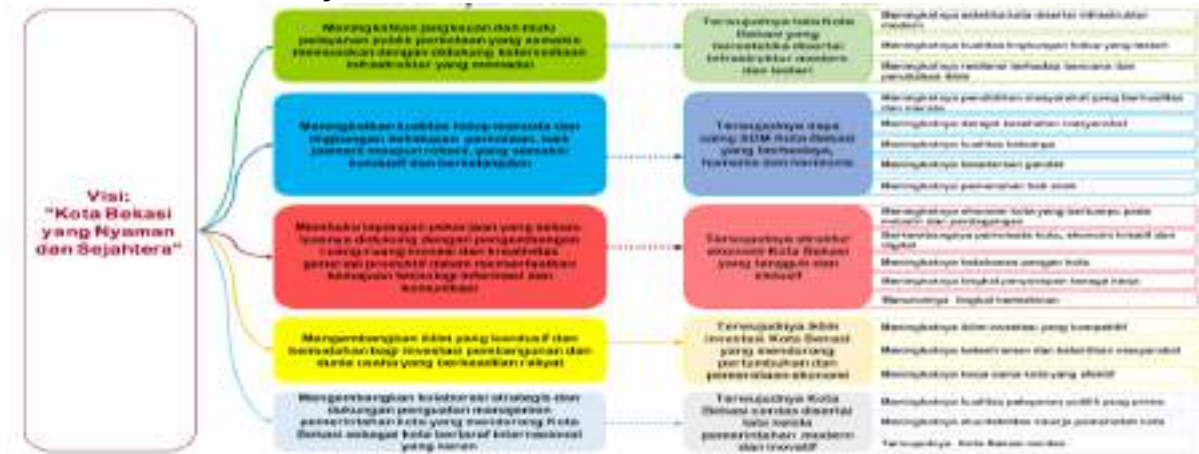
Misi-5 ini dilakukan untuk menjalin kerja sama dengan multi-pihak dan sekaligus menyiapkan terpenuhinya prasyarat kehidupan perkotaan yang bertaraf internasional dari berbagai aspek, khususnya dalam pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) yang ditetapkan PBB. Misi kelima ini berkaitan dengan kepentingan meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, responsif, dan akuntabel, sehingga mampu membentuk kota yang bertaraf internasional.

3. Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.2.

Gambar 3.2

Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi Tahun 2025-2029



Sumber: Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 bahwa misi, tujuan dan sasaran yang relevan dan menjadi dasar pertimbangan perumusan tujuan renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan tahun 2025-2029 adalah **Misi 1 yaitu “Meningkatkan Jangkauan Dan Mutu Pelayanan Publik Perkotaan Yang Semakin Memuaskan Dengan Didukung Ketersediaan Infrastruktur Yang Memadai”** dengan **Tujuan** Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang berestetika disertai dengan infrastuktur yang modern dan lestari **dengan** indicator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sedangkan **Sasaran** yang ingin di capai yaitu Terwujudnya estetika kota disertai dengan infrastuktur yang modern dan indikatornya dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur.

Perumusan tujuan dan sasaran renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2025-2029 selain didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) tahun 2025-2029 juga didasarkan pada permasalahan dan isu strategis yang terkait dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya. Dengan beberapa pertimbangan tersebut diatas maka rumusan tujuan Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu :

“MEWUJUDKAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN GEDUNG MODERN YANG INKLUSIF SERTA BERKELANJUTAN”

Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dirumuskan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang meliputi:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan indikator sasaran meliputi;
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik; dan
 - Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.



2. Meningkatnya akses hunian layak yang didukung kualitas layanan PSU dengan indikator sasaran meliputi:
 - Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan.
3. Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah dengan indikator sasaran meliputi:
 - Presentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan dan berfungsi.
4. Meningkatnya akses lahan untuk kepentingan umum dengan indikator sasaran meliputi:
 - Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 dan pertanahan dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2



Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Dinas Perkimtan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Visi	Misi I Kota Bekasi	Tujuan Kota Bekasi Tahun 2025-2029	Indikator Tujuan RPJMD 2025-2029	Sasaran RPJMD 2025-2029	Indikator Sasaran	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target					
								Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera	Meningkatkan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Perkotaan yang Semakin Memuaskan dengan Didukung Ketersediaan Infrastruktur yang Memadai	Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern	Pilar Infrastruktur (IDSD)	Tujuan: "Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman Dan Gedung Modern Yang inklusif Serta Berkelanjutan"	Indeks Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	50,95%	58,52%	62,96%	66,16%	69,24%	71,88%
						Sasaran 1: Meningkatnya akses hunian layak yang didukung kualitas layanan PSU	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan	45,05%	47,48%	50,46%	53,02%	55,70%	58,34%
						Sasaran 2: Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah	Presentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan dan berfungsi	39,41%	56,46%	63,25%	67,64%	71,09%	74,45%



Visi	Misi I Kota Bekasi	Tujuan Kota Bekasi Tahun 2025-2029	Indikator Tujuan RPJMD 2025-2029	Sasaran RPJMD 2025-2029	Indikator Sasaran	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target					
						Tahun 2025		Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
						Sasaran 3: Meningkatnya akses lahan untuk kepentingan umum	Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	48,57%	51,79%	55,7%	58,45%	61,22%	63,65%

Sumber: Hasil Analisis Dan Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029



Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Program Dan Indiaktor Kinerja Dinas Perkimtan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasarana	Program	Indikator Program		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
			Baseline	Target	Target	Target	Target	Target	Target
TUJUAN: Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman Dan Gedung Modern Yang inklusif Serta Berkelanjutan									
Sasaran 1 : Meningkatnya akses hunian layak yang didukung kualitas layanan PSU	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daaerah dengan Penganggaran	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	90,39	100	100	100	100	100	100
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	85,35	85,6	85,85	86	86,25	86,5	86,75
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100	100	100	100	100	100	100
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak	99.31	99.58	99.63	99.74	99.8	99.89	100
		Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman	1.8	2	2.5	5	5	5	5
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100	100	100
		Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100	100	100	100
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar di Kawasan perkotaani	25	21,84	37,47	53,10	68,74	84,37	100
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani	1,64	3,28	4,92	6,56	8,2	9,84	11,48



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Tujuan dan Sasarana	Program	Indikator Program		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
			Baseline	Target	Target	Target	Target	Target	Target
	program pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum	Presentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah kab/kota	23	25,26	25,78	28,5	30,03	32,52	34,78
	Program Peningkatan Prsarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	43,75	47,26	50,78	54,98	59,18	63,38	67,58
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah	program penataan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	35,71	40,6	50,89	63,89	68,56	71,5	73
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	44,69	52,09	60	65,5	70,35	75	80,35
	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik	23,21	25,54	58,5	60,35	64	66,76	70
Sasaran 3: Meningkatnya akses lahan untuk kepentingan umum	Program Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaia Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	33	36,76	43,2	50,34	55,65	61,85	65,7
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Terselaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi	0	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dan Dinas Perkimtan



3.2 STRATEGI DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah- langkah/upaya yang akan dilakukan dengan optimalisasi sumber daya, pentahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah diperlukan strategi. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, menjelaskan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selaras dengan visi Kota Bekasi " **Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera** ", maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan menyusun strategi yang dijabarkan dalam lima tahapan yang dituangkan pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3				
Pentahapan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan				
Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
•Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik • Peningkatan akuntabilitas Kinerja Dinas Perkimtan	•Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik berbasis Digital • Implementasi teknologi untuk transparansi, otomatisasi, dan pengelolaan kinerja Disperkimtan agar lebih efektif dan efisien	Peningkatan inovasi dan teknologi dalam Pelayanan Publik dan peningkatan akuntabilitas Kinerja Dinas Perkimtan	• Penggunaan teknologi dan inovasi, penyederhanaan prosedur, penetapan standar pelayanan Publik; • Peningkatan Kinerja Dinas Perkimtan yang transparan dan akuntabilitas	Keberlanjutan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan peningkatan Kinerja Dinas Perkimtan yang transparan dan akuntabilitas
Peningkatan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Kualitas Layanan PSU Yang Berkelanjutan				
• Peningkatan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan konsep hunian berimbang; • Peningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM);	• Peningkatan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh masyarakat • Peningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM);	• Peningkatan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan konsep hunian berimbang; • Peningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai	• Peningkatan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan konsep hunian berimbang; • Peningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM);	• Peningkatan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan konsep hunian berimbang; • Peningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM);



Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
		sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM);		
Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung Pemerintahan				
• Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Perkantoran • Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Pendidikan • Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Kesehatan	• Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Perkantoran • Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Pendidikan • Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Kesehatan	• Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Perkantoran • Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Pendidikan • Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Kesehatan	• Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung Perkantoran • Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung Pendidikan • Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung Kesehatan	Keberlanjutan Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung Perkantoran, Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung Pendidikan dan peningkatan Kualitas Bangunan Gedung Kesehatan
Peningkatan Akses Lahan Untuk Kepentingan Umum				
• Peningkatan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan • Peningkatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	• Peningkatan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan • Peningkatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	• Peningkatan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan • Peningkatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	• Peningkatan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan • Peningkatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Keberlanjutan Peningkatan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dan Peningkatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

3.3 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2030 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan arah kebijakan RPJMD selaras dengan Strategi dalam ranngka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Arah kebijakan yang dirumuskan guna pencapaian target-target yang telah ditentukan dapat dilihat pada Tabel 3.4.



Tabel 3.4
Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1. Undang-Undang No 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman arah kebijakan penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman: a. Perencanaan dan perancangan rumah dilakukan untuk: • Menciptakan rumah yang layak huni; • mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah; dan • meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur. b. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan: • kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah; • keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan • ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum. 2. RTRW Kota Bekasi Arahan kebijakan pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan RTRW Kota Bekasi meliputi: a. Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal, dengan strategi: • mengembangkan kawasan peruntukan perumahan; • mengarahkan kawasan peruntukan perumahan dengan pola-pola hunian vertikal; • menyediakan dan mengalokasikan lahan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; • meremajakan kawasan padat dan kumuh dengan kombinasi program pembangunan perumahan vertikal,	Strategi peningkatan kualitas hunian dan infrastruktur, dengan arah kebijakan meliputi: 1. Perbaikan kualitas rumah dengan Program Kawasan Permukiman 2. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui program; a. Program Kawasan Permukiman; b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Penanganan bencana di kawasan permukiman melalui program: a. Program Pengembangan Perumahan b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;	1. Peningkatan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan konsep hunian berimbang dengan arah kebijakan meliputi: a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha; b. Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat c. Peningkatan Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar d. Pembangunan rumah susun (rusun) sebagai solusi keterbatasan lahan dan untuk merelokasi warga dari kawasan kumuh. e. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni f. Pelaksanaan Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh g. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh h. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota i. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha j. Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru k. meningkatkan cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau l. memberikan kemudahan akses bagi MBR terhadap perumahan layak huni melalui berbagai program dan kebijakan.



Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
seperti rusun dan komersial untuk efisiensi lahan, menciptakan RTH, dan pembukaan akses kawasan; • mengatur intensitas bangunan perumahan dengan pengawasan yang ketat terhadap izin pembangunan perumahan • mengembangkan permukiman baru melalui konsep Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS) yang dapat dikoordinasikan dengan pihak swasta dan antar sektor dalam penyediaan infrastruktur; dan • mewajibkan pengembang kawasan perumahan untuk mengelola lingkungan secara terpadu dengan membuat Sewage Treatment Plant (STP) komunal b. Perwujudan pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi, dengan strategi: • meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan air bersih; • meningkatkan dan mengembangkan sumber air baku untuk penyediaan air bersih dan air minum; dan • meningkatkan dan mengembangkan sumber air baku untuk penyediaan air bersih dan air minum; mengembangkan sistem pelayanan air minum berbasis teknologi. c. Perwujudan pengembangan sistem jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional, dengan strategi: • mengembangkan jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu; dan • mengembangkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).		m. Pengembangan perumahan dengan harga yang terjangkau oleh MBR baik melalui pembangunan baru maupun perbaikan rumah tidak layak huni; n. Pengembangan berbagai skema pembiayaan perumahan bersubsidi, 2. Strategi peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) dengan arah kebijakan meliputi; a. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian b. Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) c. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) d. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); e. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik f. Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu g. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat h. peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak dan aman i. Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) perlu terus didukung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik, termasuk pengelolaan air limbah; j. peningkatan alokasi anggaran untuk pengelolaan air limbah dalam rencana pembangunan daerah k. meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan limbah



Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		3. Strategi Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung Pemerintahan dengan arah kebijakan meliputi: a. Pembangunan bangunan gedung Pendidikan b. Rehabilitasi Sedang/Berat Banguna Gedung Pendidikan Pembangunan bangunan gedung Kesehatan c. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Gedung Kesehatan d. Pembangunan bangunan gedung pemerintahan e. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Gedung pemerintahan 4. Strategi Peningkatan Akses Lahan Untuk Kepentingan Umum dengan arah kebijakan meliputi: a. Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota b. Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Hasil analisis Tahun 2025



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGARAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

4.1 PROGRAM DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2025-2029

Program adalah penjabaran Kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program dan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki Tujuan yaitu;

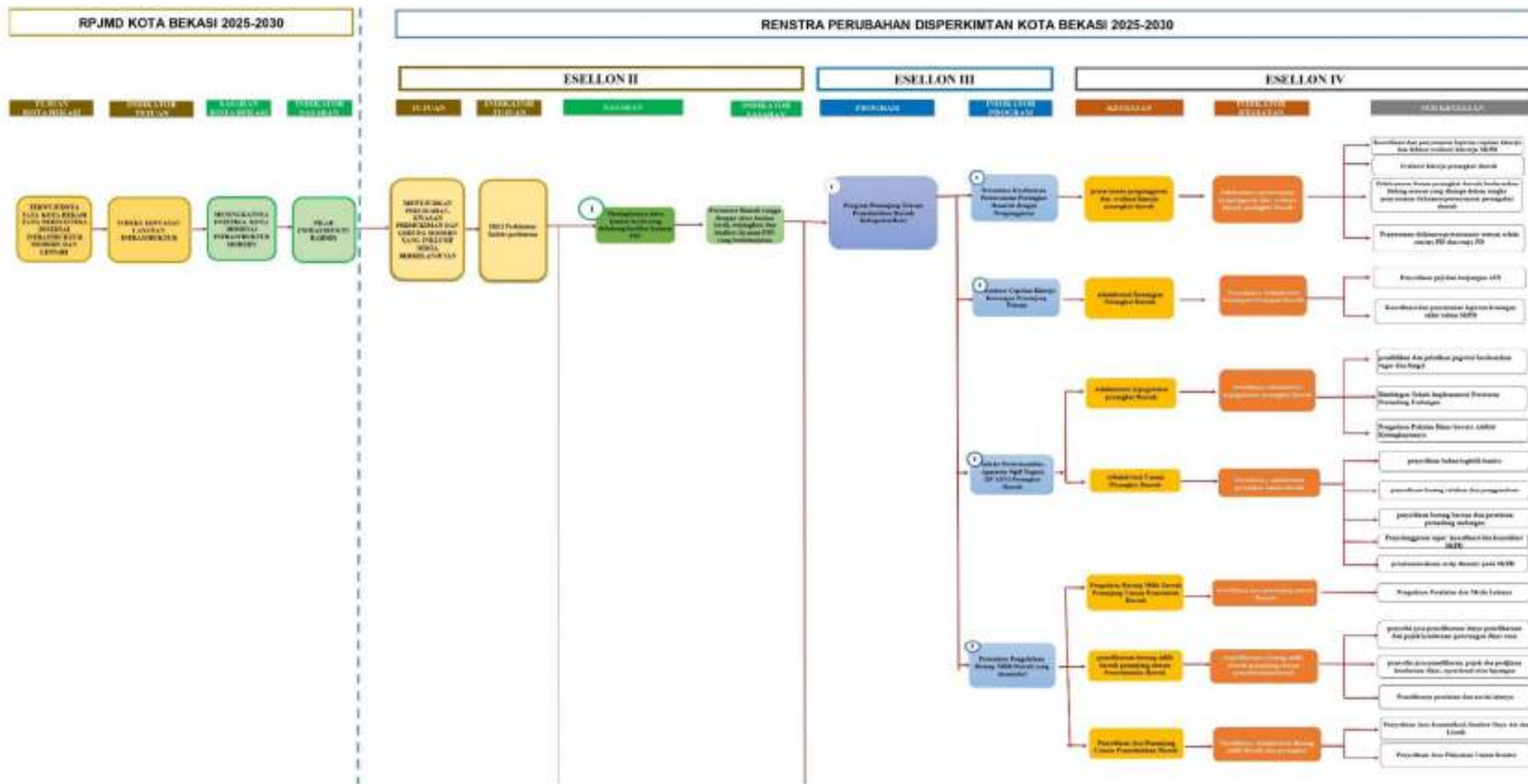
“MEWUJUDKAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN GEDUNG MODERN YANG INKLUSIF SERTA BERKELANJUTAN”.

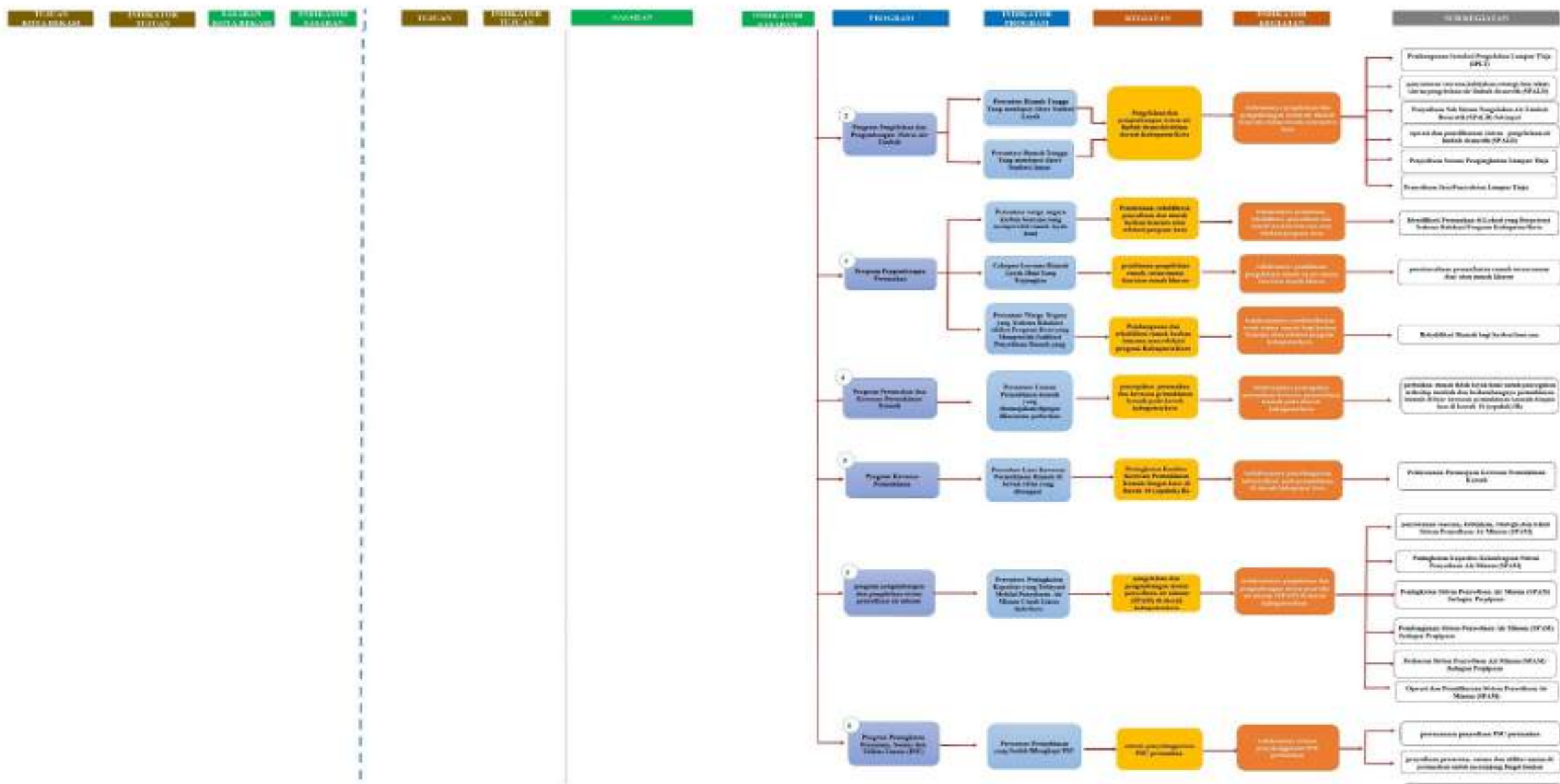
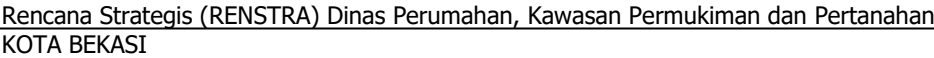
Dengan Indikator Tujuan “Indeks Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sedangkan Sasaran Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu 1) Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dengan a) Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, b) Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik. 2) Meningkatnya Akses Hunian Layak yang Didukung Kualitas Layanan PSU Dengan Indikator Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Kualitas Layanan PSU yang Berkelanjutan; 3) Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah Dengan Indikator Sasaran Presentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Ketentuan Teknis Bangunan dan Berfungsi; 4) Meningkatnya Akses Lahan Untuk Kepentingan Umum Dengan Indikator Sasaran Persentase Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum.

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, output, Program kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomleklatur yang diatur dalam peraturan dalam negeri adapun kerangka program/kegiatan/sub kegiatan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada gambar 4.1



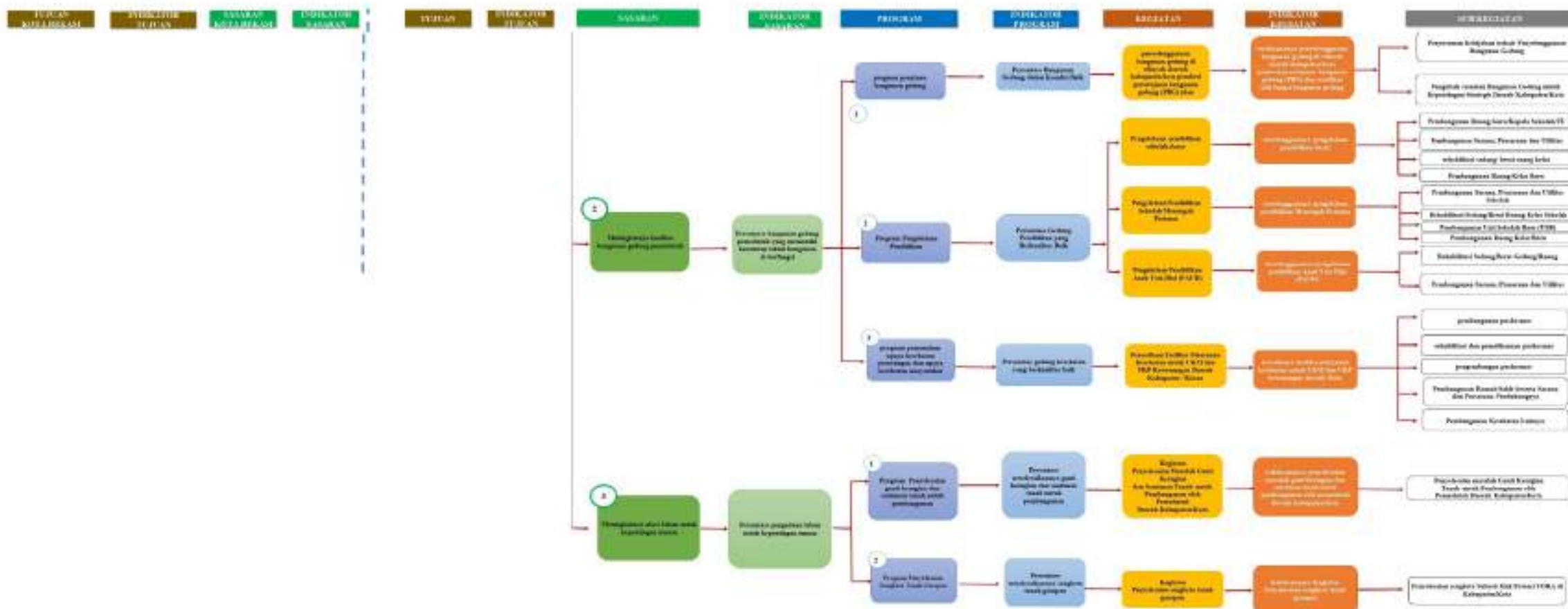
Gambar 4.1
Cascading Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi







Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI



KEPALA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA BEKASI

YURYAT HERRYADI HARYADI, S.T.
Pondok 13.1
NIP. 19790219 198211 1986



4.1.1 Uraian Program Dan Kegiatan

Dalam rangka perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran.

Penyusunan Program yang akan diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi selama lima tahun, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah program yang diselenggarakan oleh setiap perangkat daerah guna memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah adalah program urusan pemerintahan bidang perumahan dan Permukiman serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengolahan Air Limbah Domestik (UPTD PALD) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik maupun air limbah sejenis.
3. Program Pengembangan Perumahan
Program Pengembangan Perumahan adalah program urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat.
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh adalah program urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman, khususnya melalui pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap kawasan permukiman kumuh, agar tercipta lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan.
5. Program Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman adalah program urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keteraturan kawasan permukiman, baik di perkotaan, melalui penyediaan, pembangunan, penataan, serta pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dasar permukiman.
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum adalah program urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan layanan air minum bagi masyarakat, baik di kawasan perkotaan
7. Program Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)



Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) adalah program urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman yang bertujuan untuk menyediakan, meningkatkan kualitas, serta menjaga keberlanjutan prasarana, sarana, dan utilitas dasar pada kawasan perumahan dan permukiman agar layak huni, sehat, aman, dan berkelanjutan.

8. Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung adalah program urusan pemerintahan bidang bangunan gedung yang bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, layak huni, aman, nyaman, serasi, selaras dengan lingkungan, serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

9. Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan adalah program urusan pemerintahan bidang bangunan gedung yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola, manajemen, dan layanan administrasi pendidikan sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat berlangsung efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

10. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah program urusan pemerintahan bidang bangunan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan yang menyeluruh, berjenjang, merata, bermutu, dan terjangkau, baik pada tingkat individu maupun tingkat populasi.

11. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan adalah program urusan pemerintahan bidang pertanahan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kelancaran pelaksanaan pembangunan yang memerlukan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan santunan kepada pihak yang berhak atas tanah, bangunan, tanaman, maupun benda lain yang berkaitan dengan tanah.

12. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan adalah program urusan pemerintahan bidang pertanahan yang bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan konflik atau sengketa yang timbul akibat penguasaan dan pemanfaatan tanah garapan oleh masyarakat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam pengelolaan tanah.

Untuk mengurai lebih lanjut mengenai program-program yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan maka diuraikan dalam bentuk kegiatan. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- b. Administrasi keuangan perangkat daerah.
- c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah.
- d. Administrasi umum perangkat daerah.
- e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
- f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
- g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.



2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - a. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Pengembangan Perumahan
 - a. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota.
 - b. Pendataan, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota.
 - c. Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus.
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - a. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Kawasan Permukiman
 - a. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota.
7. Program Peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum (PSU)
 - a. Urusan penyelenggaraan PSU perumahan.
8. Program Penataan Bangunan Gedung
 - a. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota pemberi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
9. Program Pengelolaan Pendidikan
 - a. Kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar.
 - b. Kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama.
 - c. Kegiatan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
10. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten / Kota.
11. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
 - a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
12. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Perumusan kegiatan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029, seperti digambarkan pada tabel 4.1.

4.1.2 Uraian Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi untuk periode tahun 2025-2029 mengacu pada nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang



Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta seluruh perubahannya. Struktur tersebut menjadi dasar dalam perencanaan kinerja Perangkat Daerah (PD) secara sistematis, akuntabel, dan terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penganggaran program dan kegiatan pada tahun 2029 (tahun transisi) tetap dimasukkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan menjembatani transisi perencanaan ke periode berikutnya. Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan tahun 2029 diposisikan sebagai bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun tersebut.

Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target Dan Pagu Indikatif sebagaimana ditampilkan dalam tabel 4.2.



Tabel 4.1
Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan Kota Bekasi

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
1. Undang-Undang No 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2025–2045. 3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2024–2044. 4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi Tahun 2024–2044. 5. RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029; Misi, tujuan dan sasaran yang relevan dan menjadi dasar pertimbangan	Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Gedung Modern yang Inklusif Serta Berkelanjutan	Mewujudkan Peningkatan Kualias Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang efektif dan transparan	- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik; - Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
					Outcome 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran
					Kegiatan: Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;	Terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
					Sub Kegiatan: Evaluasi kinerja perangkat daerah;	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun
					Outcome 2: Meningkatkan Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
perumusan tujuan renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan tahun 2025-2029 meliputi: • Misi: Meningkatkan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Perkotaan yang Semakin Memuaskan dengan Didukung Ketersediaan Infrastruktur yang Memadai; • Tujuan Kota Bekasi: Terwujudnya Tata Kota Bekasi yang Berestetika Disertai Infrastruktur Modern dan Lestari; • Sasaran: Meningkatnya estetika kota disertai infrastruktur modern					Kegiatan; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Sub Kegiatan: • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					• Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Outcome 3: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah
					Kegiatan: Administrasi kepegawaian perangkat Daerah;	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat Daerah
					Sub Kegiatan: • Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
					• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
					• Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
					Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perangkat umum daerah



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
					Sub Kegiatan: • Penyediaan Bahan Logistik Kantor;	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
					• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
					• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
					• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
					Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel
					Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersediannya jasa penunjang urusan daerah
					Sub Kegiatan: • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
					• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
					Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Daerah



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	
					Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
					Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
					Sub Kegiatan: • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
					• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
					• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
		Meningkatnya Akses Hunian Layak yang Didukung Kualitas Layanan PSU	Terwujudnya kses hunian layak yang didukung kualitas layanan PSU	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan		PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Sanitasi Layak
							Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Sanitasi Aman
						Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Sanitasi Layak
							Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman
							Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan:						



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
					Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	
					Sub Kegiatan; Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Sub Kegiatan; Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Sub Kegiatan; Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
					Sub Kegiatan: Penyediaan Penyedotan Lumpur Tinja	
					PROGRAM: PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
					Outcome: Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
						Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau
						Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
					Kegiatan 1: Pembangunan dan Rehabilitasi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
					Sub Kegiatan: Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana program kabupaten/kota yang Terehabilitasi
					Kegiatan 2: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	terlaksannya pendataan, rehabilitasi, penyediaan dan rumah korban bencana atau relokasi program kota
					Sub Kegiatan: Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
					Kegiatan 3: Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	terlaksannya pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus
					Sub Kegiatan: Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
					ROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikawasan perkotaan
					Outcome: Meningkatnya kualitas kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
					Kegiatan: Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
					Sub Kegiatan: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bekasi
					PROGRAM: KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha yang ditangani
					Outcome: Meningkatnya penataan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persentase Luasan permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar di Kawasan perkotaan
					Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Sub Kegiatan: Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	
					PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah kab/kota
					Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap SPAM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
					Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
					Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Sub Kegiatan: Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Sub Kegiatan: Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					PROGRAM: PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU
					Outcome: Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
					Kegiatan: Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terlaksannya urusan penyelenggaraan PSU perumahan
					Sub Kegiatan: Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
					Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
					Sub Kegiatan: Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah	Terwujudnya Kualitas bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan & berfungsi	Presentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan & berfungsi		UPTD Pemakaman
					PROGRAM: PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik
					Outcome: Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik
					Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
					Sub Kegiatan: • Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					• Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan	



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
					Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	
					PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik
					Outcome: Meningkatnya kualitas gedung pendidikan	Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik
					Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar:	terselenggaranya pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar
					Sub Kegiatan : • Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	
					• Pembangunan ruang kelas baru	
					• Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					• Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	terselenggaranya pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama
					Sub Kegiatan : • Pembangunan Ruang Kelas Baru	•
					• Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					• Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					• Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	
					Kegiatan: Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	terselenggaranya pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
					Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana, PraRehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD sarana dan Utilitas	
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					PROGRAM: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik
					Outcome: Meningkatnya kualitas gedung kesehatan	Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik
					Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	
					Sub Kegiatan: Pembangunan Puskesmas	
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
					Pengembangan Puskesmas	
					Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
					Pembangunan Kesehatan Lainnya	
					PROGRAM:	



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
					PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
					Outcome: Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (updet perkim)	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
					Kegiatan: Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
		Meningkatnya akses lahan untuk kepentingan umum	Terwujudnya akses lahan untuk kepentingan umum	Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	Subkegiatan: Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					PROGRAM: PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi
					Outcome: Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi
					Kegiatan: Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Kegiatan Penyelesaian sengketa tanah garapan



NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output
					Sub Kegiatan: • Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) tahun Daerah Kabupaten/Kota
					• Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko	

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi, Tahun 2025



Tabel 4.2
Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator, Target dan Pagu Indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi

Kode	Bidang Urusan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.025.688.800		18.183.458.000		21.086.561.000		21.091.561.000		21.246.561.000		21.301.561.000	
		1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100%	65.930.000	100%	90.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000	100%	215.000.000	100%	215.000.000	
		2. Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	90,39 %	100%	21.029.015.440	100%	17.833.458.000	100%	19.453.561.000	100%	19.453.561.000	100%	19.453.561.000	100%	19.453.561.000	
		3. Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	85,35	85,6	395.000.000	85,85%	0	86%	660.000.000	86,25 %	665.000.000	86,50 %	670.000.000	86,75 %	675.000.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Pro gram/Kegia tan/Sub Kegiatan	Baselin e 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		ASN) Perangkat Daerah	Perangkat Daerah														
		4. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaa n Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	535. 743.360	100%	260. 000.000	100%	858. 000.000	100%	858.000.000	100%	908. 000.000	100%	958. 000.000	
		1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah dengan Penganggaran	Persentase Keselarasan Perencanaa n Perangkat Daerah dengan Penganggar an														
X.XX.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				65.930.000		90.000.000		115.000.000		115.000.000		215.000.000		215.000.000	



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	15.000.000	5 Laporan	15.000.000	5 Laporan	15.000.000	5 Laporan	15.000.000	5 Laporan	15.000.000	5 Laporan	15.000.000	
X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1 Dokumen	50.930.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	1 Berita Acara	25.000.000	2 Berita Acara	50.000.000	2 Berita Acara	50.000.000	2 Berita Acara	50.000.000	2 Berita Acara	50.000.000	
X.XX.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	
		2. Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan														
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.213.972.000		16.078.458.000		18.213.972.000		18.213.972.000		18.213.972.000		18.213.972.000	



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Pro gram/Kegia tan/Sub Kegiatan	Baselin e 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
X.XX.01.1. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.296 orang/b ulan	3.388 orang/b ulan	18.198.972.000	3.388 orang/bul an	16.063.458.000	3.388 orang/b ulan	18.198.972.000	3.388 orang/b ulan	18.198.972.000	3.388 orang/b ulan	18.198.972.000	3.388 orang/b ulan	18.198.972.000	
X.XX.1.1.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lapora n	1 Lapora n	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Lapora n	15.000.000	1 Lapora n	15.000.000	1 Lapora n	15.000.000	1 Lapora n	15.000.000	
		3. Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionali tas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah														
X.XX.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat Daerah				595.000.000		595.000.000		660.000.000		665.000.000		670.000.000		675.000.000	
X.XX.01.2. 05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	-	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	1 Paket	350.000.000	



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Pro gram/Kegia tan/Sub Kegiatan	Baselin e 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
			Kelengkapa n														
X.XX.01.2. 05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	45.000.000	10 Orang	45.000.000	10 Orang	60.000.000	10 Orang	65.000.000	10 Orang	70.000.000	10 Orang	75.000.000	
X.XX.01.2. 05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementa si Peraturan Perundang- Undangan	-	181 Orang	200.000.000	181 Orang	200.000.000	181 Orang	250.000.000	181 Orang	250.000.000	181 Orang	250.000.000	181 Orang	250.000.000	
X.XX.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perangkat umum daerah				895.225.000		635.000.000		665.000.000		665.000.000		665.000.000		665.000.000	
X.XX.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	510.225.000	4 Paket	300.000.000	4 Paket	300.000.000	4 Paket	300.000.000	4 Paket	300.000.000	4 Paket	300.000.000	



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	2 Paket	200.000.000	
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000	
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	85.000.000	
X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	55.000.000	
		4. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel														



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Daerah		100%	100%	1.427.824.548	100%	1.120.000.000	100%	1.547.824.548	100%	1.547.824.548	100%	1.547.824.548	100%	1.547.824.548	
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000	12 Laporan	120.000.000	
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.427.824.548	12 Laporan	1.000.000.000	12 Laporan	1.427.824.548	12 Laporan	1.427.824.548	12 Laporan	1.427.824.548	12 Laporan	1.427.824.548	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah		100%	100%	187.743.360	100%	200.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	26 Unit	187.743.360	25 Unit	200.000.000	20 Unit	350.000.000	20 Unit	350.000.000	20 Unit	350.000.000	20 Unit	350.000.000	



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	100%	398.000.000	100%	260.000.000	100%	658.000.000	100%	658.000.000	100%	658.000.000	100%	658.000.000	
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	46 Unit	298.000.000	46 Unit	150.000.000	46 Unit	298.000.000	46 Unit	298.000.000	46 Unit	298.000.000	46 Unit	298.000.000	
X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	300.000.000	
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	34 Unit	50.000.000	34 Unit	60.000.000	34 Unit	60.000.000	34 Unit	60.000.000	34 Unit	60.000.000	34 Unit	60.000.000	



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Gedung Pendidikan	Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	44,69	52,09	81.237.089.551	60	82.025.183.383	65,5	83.123.591.909	70,35	65.304.041.937	75	68.647.608.884	80,35	74.139.417.595	
		Meningkatnya Kualitas Gedung Pendidikan	Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	44,69	52,09	81.237.089.551	60	82.025.183.383	65,5	83.123.591.909	70,35	65.304.041.937	75	68.647.608.884	80,35	74.139.417.595	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					43.760.117.651		40.953.892.543		32.829.716.909		27.943.403.937		28.497.779.884		14.239.000.000	
1.01.02.2.01.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	17 Ruang	31.841.934.129	13 Ruang	15.332.542.326	22 Ruang	16.248.168.500	6 Ruang	3.405.170.000	10 Ruang	5.946.532.000	6 Ruang	3.898.000.000	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah yang Bertambah Ruang Kelas Baru	-	6 Ruang	9.727.364.322	18 Ruang	11.584.797.677	26 Ruang	16.327.696.000	21 Ruang	18.875.814.526	28 Ruang	20.893.736.000	9 Ruang	5.843.000.000	
1.01.02.2.01.0048	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah dibangun	-	2 Unit	1.257.860.000	27 Unit	10.124.723.000	1 Unit	253.852.409	5 Unit	5.012.419.411	13 Unit	1.657.511.884	4 Unit	1.600.000.000	
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	1 Ruang	932.959.200	6 Ruang	3.911.829.540	-	-	1 Ruang	650.000.000	-	-	4 Ruang	2.898.000.000	



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Pro gram/Kegia tan/Sub Kegiatan	Baselin e 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
			yang Telah Dibangun														
1.01.02.2.0 2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					36.362.182.500		41.071.290.840		49.893.875.000		28.510.638.000		36.454.829.000		59.900.417.595	
1.01.02.2.0 2.0059	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah yang Bertambah Ruang Kelas Baru	-	2 Ruang	3.546.477.000	39 Ruang	19.331.978.240	12 Ruang	5.967.000.000	10 Ruang	7.100.000.000	2 Ruang	1.401.829.000	30 Ruang	20.986.924.160	
1.01.02.2.0 2.0001	Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	-	-	2 Unit	15.668.924.160	1 Unit	11.027.638.000	3 Unit	21.410.638.000	2 Unit	29.081.000.000	2 Unit	35.479.000.000	
1.01.02.2.0 2.0014	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilita si Sedang/Ber at	-	10 Ruang	32.815.705.500	6 Ruang	6.070.388.440	30 Ruang	32.293.387.000	-	-	8 Ruang	5.972.000.000	5 Ruang	3.434.493.435	
1.01.02.2.0 2.0012	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	1 Unit	605.850.000	-	-	-	-	-	-	
1.01.02.2.0 3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak					1.114.789.400		0		400.000.000		8.850.000.000		3.695.000.000		-	



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Usia Dini (PAUD)																
1.01.02.2.03.0049	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	-	-	-	-	-	-	1 Ruang	450.000.000	-	-	-	-	
1.01.02.2.03.0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	-	2 Unit	1.114.789.400	-	-	1 Unit	400.000.000	3 Unit	8.400.000.000	3 Unit	3.695.000.000	-	-	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Gedung Kesehatan	Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik	23,21	25,54	2.328.465.232	58,5	7.500.000.000	60,35	7.888.500.000	64	8.342.877.600	66,76	8.770.032.933	70	9.240.106.698	
		Meningkatnya Kualitas Gedung Kesehatan	Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik	23,21	25,54	2.328.465.232	58,5	7.500.000.000	60,35	7.888.500.000	64	8.342.877.600	66,76	8.770.032.933	70	9.240.106.698	
1.02.02.1.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan					2.328.465.232		7.500.000.000		7.888.500.000		8.342.877.600		8.770.032.933		9.240.106.698	



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	Daerah Kabupaten / Kota																
1.02.02.2.0 1.0002	Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	-	-	-	1 Unit	7.000.000.000	0	-	0	-	1 Unit	3.134.177.280	2 unit	7.240.106.698	
1.02.02.2.0 1.0009	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	-	2 Unit	2.328.465.232	1 Unit	500.000.000	1 Unit	82.377.000	1 Unit	3.000.000.000	0	-	0	-	
1.02.02.2.0 1.0006	Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	-	-	0	-	7 Unit	4.406.123.000	3 Unit	5.342.877.600	1 Unit	2.000.000.000	0	-	



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Pro gram/Kegia tan/Sub Kegiatan	Baselin e 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1.02.02.2.0 1.0001	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-	-	-	0	-	1 Unit	2.500.000.000	0	-	1 Unit	3.635.855.653	1 Unit	2.000.000.000	
1.02.02.2.0 1.0003	Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	-	-	-	0	-	1 Unit	900.000.000	0	-	0	-	0	-	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAA N DAN PENGEMBANG AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap SPAM	Persentase Peningkata n Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum	23	25,26	25.877.444.600	25,78	16.735.330.800	28,5	16.915.762.932	30,03	3.874.705.781	32,52	4.073.090.717	34,78	4.291.408.380	
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap SPAM	Persentase Peningkata n Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum	23	25,26	25.877.444.600	25,78	16.735.330.800	28,5	16.915.762.932	30,03	3.874.705.781	32,52	4.073.090.717	34,78	4.291.408.380	
1.03.03.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					25.877.444.600		16.735.330.800		16.915.762.932		3.874.705.781		4.073.090.717		4.291.408.380	



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	di Daerah Kabupaten/Kota																
1.03.03.2.0 1.0026	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	12 Unit	4.453.680.000	11 Unit	2.315.290.000	12 Unit	3.260.200.000	11 Unit	2.452.170.426	11 Unit	2.650.554.771	11 Unit	3.173.850.000	
1.03.03.2.0 1.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	-	2 Lembaga	161.480.000	1 Lembaga	161.480.000	1 Lembaga	161.480.000	1 Lembaga	161.480.000	1 Lembaga	161.480.000	1 Lembaga	161.480.000	
1.03.03.2.0 1.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	-	4 Dokumen	425.700.000	5 Dokumen	528.150.000	4 Dokumen	1.261.050.000	4 Dokumen	1.261.050.000	4 Dokumen	1.261.050.000	3 Dokumen	452.450.000	



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Pro gram/Kegia tan/Sub Kegiatan	Baselin e 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1.03.03.2.0 1.0027	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	-		10.989.400.000		9.000.000.000		9.000.018.637		-		-		503.628.380	
1.03.03.2.0 1.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	253 SR	2.932.250.000	93 SR	504.280.000		-		-		-		-	
1.03.03.2.0 1.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatka n	-		6.914.934.600		4.226.130.800		3.233.014.295		-		-		-	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang mendapat Akses Sanitasi Layak	99,31	99,58	21.458.850.000	99,63	45.827.719.399	99,74	43.468.494.212	99,8	45.972.279.479	99,89	48.326.060.188	100	50.916.337.014	



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Pro gram/Kegia tan/Sub Kegiatan	Baselin e 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
			Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Sanitasi Aman	1,8	2		2,5		5		5		5		5		
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Sanitasi Layak	99,31	99,58	21.458.850.000	99,63	45.827.719.399	99,74	43.468.494.212	99,8	45.972.279.479	99,89	48.326.060.188	100	50.916.337.014	
			Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Sanitasi Aman	1,8	2		2,5		5		5		5		5		
1.03.05.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																
1.03.05.2.0 1.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah RumahTan gga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	-	150	4.712.235.000	150	4.517.651.000	(200) (10 unit) (7 paket)	22.205.594.212	(200)(1 0 unit) (7 paket)	23.859.379.479	(200) (10 unit) (7 paket)	25.213.160.188	(200) (10 unit) (7 paket)	26.813.437.014	



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1.03.05.2.0 1.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-	3 Dokumen	401.100.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	401.100.000	3 Dokumen	401.100.000	3 Dokumen	401.100.000	3 Dokumen	401.100.000	
1.03.05.2.0 1.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	1 Unit	14.010.000.000	1 Unit	15.144.518.400	2 Unit	20.500.000.000	2 Unit	21.500.000.000	2 Unit	22.500.000.000	2 Unit	23.500.000.000	
1.03.05.2.0 1.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	-	3 paket	2.100.000.000	3 paket	26.015.549.999	5	361.800.000	5	211.800.000	5	211.800.000	5	201.800.000	
1.03.05.2.0 1.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1.03.05.2.0 1.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN	Meningkatnya Kualitas Bangunan	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi baik	35,71	40,6	187.379.223.48 7	50,89	144.559.827.12 0	63,89	153.734.997.73 0	68,56	154.129.333.60 0	71,5	162.020.755.48 0	73	170.121.793.25 4	
		Meningkatnya Kualitas Bangunan	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi baik	35,71	40,6	187.379.223.48 7	50,89	144.559.827.12 0	63,89	153.734.997.73 0	68,56	154.129.333.60 0	71,5	162.020.755.48 0	73	170.121.793.25 4	
1.03.08.2.0 1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung																



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Pro gram/Kegia tan/Sub Kegiatan	Baselin e 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1.03.08.2.0 1.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentinga n Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang Diubahsuai kan	-	31 Bangu nan Gedun g	187.379.223.48 7	25 Banguna n Gedung	141.370.376.12 0	23 Bangu nan Gedun g	153.734.997.73 0	10 Bangu nan Gedun g	154.129.333.60 0	2 Bangu nan Gedun g	162.020.755.48 0	2 Bangu nan Gedun g	170.121.793.25 4	
1.03.08.2.0 1.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraa n Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelengg araan Bangunan Gedung	-	-	-	13 Dokumen	3.189.451.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Perenca naan, Pemban gunan, Pengaw asan, dan Pemanf aatan Bangun an Gedung Daerah Kabupat en/Kota
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANG AN PERUMAHAN	Terpenuhi nya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperole h Rumah Layak Huni	100	100	3.360.019.173	100	2.750.019.173	100	2.892.470.166	100	3.059.076.448	100	3.215.701.162	100	3.288.062.744	
			Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	6,26	6,26		6,26		6,26		6,26		6,26		6,26		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
			Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100	100		100		100		100		100		100		
		Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	100	3.360.019.173	100	2.750.019.173	100	2.892.470.166	100	3.059.076.448	100	3.215.701.162	100	3.288.062.744	
			Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	6,26	6,26		6,26		6,26		6,26		6,26		6,26		



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Pro gram/Kegia tan/Sub Kegiatan	Baselin e 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
			Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kota yang Memperole h Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100	100		100		100		100		100		100		
1.04.02.2.0 3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota															
1.04.02.2.0 3.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasiny a Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilita si	-	50 Unit Rumah	1.100.000.000	25 Unit Rumah	550.000.000	25 Unit Rumah	550.000.000	25 Unit Rumah	550.000.000	25 Unit Rumah	550.000.000	25 Unit Rumah	550.000.000	
1.04.02.2.0 1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program															



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Pro gram/Kegia tan/Sub Kegiatan	Baselin e 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Kabupaten / Kota															
1.04.02.2.0 1.0002	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.04.02.2.0 5	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus															
1.04.02.2.5. 0003	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Penatausah aan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	1 Dokum en	2.260.019.173	1 Dokumen	2.100.019.173	1 Dokum en	2.342.470.166	1 Dokum en	2.509.076.448	1 Dokum en	2.665.791.162	1 Dokum en	2.738.062.744,0 0	



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Pro gram/Kegia tan/Sub Kegiatan	Baselin e 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukima n Kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	1,64	3,28	16.876.000.000	4,92	20.399.427.578	6,56	21.456.117.927	8,2	22.691.990.319	9,84	23.853.820.223	11,48	25.132.384.987	
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukima n Kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	1,64	3,28	16.876.000.000	4,92	20.399.427.578	6,56	21.456.117.927	8,2	22.691.990.319	9,84	23.853.820.223	11,48	25.132.384.987	
1.04.04.2.0 1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota																



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Pro gram/Kegia tan/Sub Kegiatan	Baselin e 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1.04.04.2.0 1.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkemban gnya Permukima n Kumuh di Luar Kawasan Permukima n Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		168 Unit Rumah	16.876.000.000	99 Unit Rumah	20.399.427.578	109 Unit Rumah	21.456.117.927	109 Unit Rumah	22.691.990.319	109 Unit Rumah	23.853.820.223	109 Unit Rumah	25.132.384.987	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Penataan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Persentase Luasan Permukima n Kumuh yang Diremajaka n / DIpugar di Kawasan Perkotaan	16,03	21,84	3.223.350.640	37,47	1.387.620.800	53,1	1.459.499.557	68,74	1.543.566.732	84,37	1.622.597.349	100	1.709.568.567	



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Meningkatnya Penataan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan / DIpugar di Kawasan Perkotaan	16,03	21,84	3.223.350.640	37,47	1.387.620.800	53,1	1.459.499.557	68,74	1.543.566.732	84,37	1.622.597.349	100	1.709.568.567	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha															
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan			3.223.350.640		1.387.620.800		1.459.499.557		1.543.566.732		1.622.597.349		1.709.568.567	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU	43,75	47,26	80.780.028.878	50,78	66.882.239.600	54,98	70.346.739.611	59,19	74.398.711.813	63,38	78.207.925.858	67,58	79.772.084.375	
		Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU	43,75	47,26	80.780.028.878	50,78	66.882.239.600	54,98	70.346.739.611	59,19	74.398.711.813	63,38	78.207.925.858	67,58	79.772.084.375	



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		16 Dokumen	1.629.400.000	14 Dokumen	1.410.500.000	16 Dokumen	1.515.000.000	16 Dokumen	1.515.000.000	16 Dokumen	1.515.000.000	16 Dokumen	1.515.000.000	
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		-	79.150.628.878	21 Lokasi	65.471.739.600	32 Lokasi	68.831.739.611	32 Lokasi	72.883.711.813	32 Lokasi	76.692.925.858	32 Lokasi	78.257.084.375	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Presentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi	-	-	-	1 Berita Acara	100.000.000	1 Berita Acara	105.180.000	1 Berita Acara	111.238.368	1 Berita Acara	116.933.772	1 Berita Acara	123.201.423	



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Pro gram/Kegia tan/Sub Kegiatan	Baselin e 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Presentase Terselesaik annya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifika t yang Dilakukan Melalui Mediasi	-	-	-	1 Berita Acara	100.000.000	1 Berita Acara	105.180.000	1 Berita Acara	111.238.368	1 Berita Acara	116.933.772	1 Berita Acara	123.201.423	
2.10.04.2.0 1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan															
2.10.04.01. 0003	Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota	Terselesaikanny a sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaia n Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	1 Berita Acara	100.000.000	1 Berita Acara	105.180.000	1 Berita Acara	111.238.368	1 Berita Acara	116.933.772	1 Berita Acara	123.201.423	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIA N GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNA N	Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Terselesaik annya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk	33	36,76	231.371.969.88 6	43,2	170.591.744.74 3	50,34	185.233.844.74 3	55,65	173.920.047.00 0	61,85	179.137.648.41 0	65,7	195.260.036.76 7	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Baseline 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
			Pembangunan														
		Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase terselesaikannya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	33	36,76	231.371.969.886	43,2	170.591.744.743	50,34	185.233.844.743	55,65	173.920.047.000	61,85	179.137.648.410	65,7	195.260.036.767	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota															



Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KOTA BEKASI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Outcome Program/Output Kegiatan/ Output Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/Pro gram/Kegia tan/Sub Kegiatan	Baselin e 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Ket
					Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaia n Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
2.10.05.2.0 1.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		24 Dokum en	231.371.969.88 6	13 Dokumen	170.591.744.74 3	14 Dokum en	185.233.844.74 3	14 Dokum en	173.920.047.00 0	14 Dokum en	179.137.648.41 0	15 Dokum en	195.260.036.76 7	

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi, Tahun 2025
Keterangan



4.2 PROGRAM PRIORITAS DISPERKIMTAN

Program prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Program prioritas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 beserta pagu indikatif (merupakan sigma pagu subkegiatan yang paling dominan berkontribusi terhadap program prioritas) dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Program Prioritas Dan Pagu Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Program Prioritas Disperkimtan	Indikator	Pagu Indikatif Dalam Juta (Rp 000.000)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum	25.877.44.600	16.735.330.800	16.915.762.932	3.874.705.781	4.073.090.717	4.291.408.380
Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1,110,000,000	400,000,000	400,000,000	500,000,000	550,000,000	600,000,000
	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	2,250,019,173	2,250,019,173	2,250,019,173	2,250,019,173	2,250,019,173	2,250,019,173
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	0	100,000,000	242,450,993	309,057,275	415,681,989	438,043,571
		3,360,019,173	2,750,019,173	2,892,470,166	3,059,076,448	3,215,701,162	3,288,062,744
Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya penataan permukiman kumuh di kawasan perkotaan"	16,876,000,000	20,399,427,578	21,456,117,927	22,691,990,319	23,853,820,223	25,132,384,987
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/ dipugar dikawasan perkotaan	3.223.350.640	1.387.620.800	1.459.499.557	1.543.566.732	1.622.597.349	1.709.568.567
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Sanitasi Layak	7,458,850,000	4,667,650,000	23,468,494,212	24,972,279,479	26,326,060,188	27,916,337,014
	Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman	14,000,000,000	41,160,068,399	20,000,000,000	21,000,000,000	22,000,000,000	23,000,000,000
		21,458,850,000	45,827,718,399	43,468,494,212	45,972,279,479	48,326,060,188	50,916,337,014
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	80.780.028.878	66.882.239.600	70.346.739.611	74.398.711.813	78.207.925.858	79.772.084.375
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase gedung pendidikan yang berkualitas baik	81.237.089.551	82.025.183.383	83.123.591.909	65.304.041.937	68.647.608.884	74.139.417.595
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik	2.328.465.232	7.500.000.000	7.888.500.00	8.342.877.600	8.770.032.933	9.240.106.698



Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
---	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dokumen RPJMD Kota Bekasi Kota Bekasi Dan Disperkimtan Tahun 2025

4.2.1 Program Prioritas Yang Mendukung Penanggulangan Dan Pengentasan Kemiskinan

Salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi yaitu terkait dengan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Meskipun kemiskinan Kota Bekasi menunjukkan tren yang menurun, namun upaya terpadu diperlukan agar kemiskinan bisa dikurangi dan ditanggulangi, sehingga dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupaya untuk berkontribusi terhadap penanggulangan dan pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung penanggulangan dan pengentasan kemiskinan Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Lebih jelasnya mengenai Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang mendukung penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dapat dilihat pada tabel 4.5.



Tabel 4.5
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Yang Mendukung
Penanggulangan Dan Pengentasan Kemiskinan

Program Prioritas	Outcame	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap SPAM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	• Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); • Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan; • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) • Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya penataan permukiman kumuh di kawasan perkotaan"	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	• Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat; • Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD); • Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) • Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan



		untuk Menunjang Fungsi Hunian	
Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya kualitas gedung pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar:	• Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas • Pembangunan ruang kelas baru • Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah • Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	• Pembangunan Ruang Kelas Baru • Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) • Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah • Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	• Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD; • Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas gedung kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	• Pembangunan Puskesmas • Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas • Pengembangan Puskesmas • Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya • Pembangunan Kesehatan Lainnya

Sumber : RPJMD Kota Bekasi dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi, Tahun 2025

4.2.2 Sub Kegiatan Yang Mendukung Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Program prioritas lainnya yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi yaitu terkait dengan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting, sehingga dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupaya untuk berkontribusi terhadap Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting melalui pencapaian akses Akses terhadap Air Minum Aman dan Akses terhadap Sanitasi Aman dimana sub kegiatan yang Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kota Bekasi Tahun 2025-2029. lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

Kelompok Sasaran	Indikator Layanan	Sub Kegiatan
Rumah tangga masyarakat	Akses terhadap Air Minum Aman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa
		Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)



Kelompok Sasaran	Indikator Layanan	Sub Kegiatan
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
Rumah Tangga Masyarakat	Akses terhadap Sanitasi Aman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
		Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
		Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
		Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
		Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota



Kelompok Sasaran	Indikator Layanan	Sub Kegiatan
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

Sumber : RPJMD Kota Bekasi dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi, Tahun 2025

4.3 PROGRAM DUKUNGAN DISPERKIMTAN TERHADAP PENCAPAIAN JABAR ISTIMEWA

Selain melaksanakan prioritas pembangunan, Disperkimtan juga berupaya untuk berkontribusi terhadap pencapaian Jabar Istimewa. Kontribusi Disperkimtan terhadap pencapaian Jabar Istimewa yaitu yang terkait dengan pencapai:

- Langkah kahiji: Infrastruktur Istimewa (Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik, Sanitasi);
- Langkah katuju: Lingkungan Hidup Istimewa (Mengembalikan Kondisi Lingkungan)

Kontribusi Disperkimtan terhadap pencapaian Jabar Istimewa dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini.

4.4 PROGRAM DUKUNGAN DISPERKIMTAN TERHADAP PENCAPAIAN ASTA CITA

Dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik, dan otonomi daerah maka Disperkimtan akan berkontribusi terhadap kegiatan prioritas utama dan proyek strategis nasional (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029 Kontribusi Disperkimtan Kota Bekasi terhadap pencapaian Asta Cita yang meliputi:

- Kegiatan Prioritas Utama /Program Nasional (PN 2) yang meliputi:
 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hili
 - Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS;
- Proyek Strategis Nasional yaitu Pembangunan 3 juta Rumah

Lebih jelasnya Kontribusi Disperkimtan Kota Bekasi terhadap pencapaian Asta Cita dapat di lihat pada tabel 4.8.



Tabel 4.7
Program Dukungan DISPERKIMTAN Terhadap Pencapaian JABAR Istimewa

Jabar Istimewa	Program	Pagu Indikatif Dalam Juta (Rp 000.000)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Langkah kahiji: Infrastruktur Istimewa (Pembangunan Infrastruktur Jalan, Listrik, Sanitasi)	Program Pengelolaan dan Sistem Penyediaan Air Minum	25.877.444.600	16.735.330.800	16..915.762.932	3.874.705.781	4.073.090.717	4.291.408.380
	Program Pengembangan Perumahan	3,360,019,173	2,750,019,173	2,892,470,166	3,059,076,448	3,215,701,162	3,288,062,744
	Program Kawasan Permukiman	16.876. 000.000	20.399. 427.578	21.456. 117.927	22.691. 990.319	23.853. 820.223	25.132. 384.987
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.223. 350.640	1.387. 620.800	1.459. 499.557	1.543. 566.732	1.622. 597.349	1.709. 568.567
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	80.780. 028.878	66.882. 239.600	70.346. 739.611	74.398.711.813	78.207.925.858	79.772.084.375
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	21,458,850,000	45,827,718,399	43,468,494,212	45,972,279,479	48,326,060,188	50,916,337,014
Langkah katuju: Lingkungan Hidup Istimewa (Mengembalikan Kondisi Lingkungan)	Program Penataan Bangunan Gedung	187.379.223.487	124.559.827.120	145.734.997.730	154.129.333.600	162.020.755.480	170.121.793.254
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.223. 350.640	1.387. 620.800	1.459. 499.557	1.543. 566.732	1.622. 597.349	1.709. 568.567

Sumber : RPJMD Kota Bekasi dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi, Tahun 2025



Tabel 4.8
Program Dukungan Disperkimtan Terhadap Pencapaian Asta Cita

Kegiatan Prioritas Utama/Proyek Strategis Nasional	Program	Pagu Indikatif Dalam Juta (Rp 000.000)						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Kegiatan Prioritas Utama (PN.2)								
Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	25.877.444.600	16.735.330.800	16..915.762.932	3.874.705.781	4.073.090.717	4.291.408.380	
Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	21.458.850.00	45.827.719.399	43.468.494.212	45.972.279.479	48.326.060.188	50.916.337.014	
Proyek Strategis Nasional								
Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Pengembangan Perumahan	3.360. 019.173	2.750. 019.173	2.892. 470.166	3.059. 076.448	3.215. 701.162	3.288. 062.744	

Sumber : RPJMD Kota Bekasi dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi, Tahun 2025



4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 dan sebagai ukuran atas indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dari instansi pemerintah. Kata kinerja (*performance*) dalam konteks tugas sama artinya dengan prestasi kerja.

IKU adalah catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi fungsi atau pekerjaan atau kegiatan tertentu selama waktu tertentu. Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang akan dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau apa saja yang keluar (*outcome*).

Pemilihan dan penetapan indicator kinerja utama harus menganut prinsip SMART, memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

1. Specific (Spesifik):

Tujuan harus jelas dan terperinci. Hindari tujuan yang ambigu atau terlalu umum.

2. Measurable (Terukur):

Tujuan harus dapat diukur sehingga kemajuan dapat dilacak. Gunakan angka, persentase, atau indikator lain yang jelas untuk mengukur pencapaian.

3. Achievable (Dapat Dicapai):

Tujuan harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang ada. Tujuan yang terlalu ambisius bisa menjadi kontraproduktif.

4. Relevant (Relevan):

Tujuan harus selaras dengan tujuan yang lebih besar dan memberikan manfaat nyata. Pastikan tujuan tersebut relevan dengan konteks dan kebutuhan yang ada.

5. Time-bound (Batas Waktu):

Tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas. Dengan adanya tenggat waktu, akan lebih mudah untuk memantau kemajuan dan memastikan tujuan tercapai tepat waktu.

Dalam Rencana Strategis Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 menetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan dampak nyata dari intervensi kebijakan. Untuk lebih jelasnya mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel 4.8.



Tabel 4.8
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Sasaran DPKPP	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meningkatnya akses hunian layak yang didukung kualitas layanan PSU	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan	45,05	47,48	50,46	53,02	55,70	58,34
Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah	Persentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan & berfungsi	39,41	56,46	63,25	67,64	71,09	74,45
Meningkatnya akses lahan untuk kepentingan umum	Persentase Pengadaan lahan untuk kepentingan umum	48,57	51,79	55,7	58,45	61,22	63,65

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi,

4.6 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKK)

IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. IKK Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025-2029 disajikan sebagaimana pada tabel 4.9 berikut.

Tabel 4.9
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama	Baseline	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak	99,31	99,58	99,63	99,74	99,89	99,89	100
Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman	1,8	2	2,5	5	5	5	5
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar dikawasan perkotaan	16,03	21,84	37,47	53,1	68,74	84,37	100
Persentase Luas Kawasan Permukiman	1,64	3,28	4,92	6,56	8,2	9,84	11,46



Indikator Kinerja Utama	Baseline	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Kumuh di bawah 10 ha yang ditangani							
Presentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah kab/kota	23	25,26	25,78	28,5	30,03	32,52	34,78
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	43,75	47,26	50,78	54,98	59,18	63,38	67,58

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi,



BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Dalam RPJMD telah ditetapkan capaian dari indikator tujuan, indikator sasaran dan indikator kinerja program yang harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah. Untuk itu sebagai salah satu perangkat daerah rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan 5 (Lima) Tahun di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi. Indikator dan target yang di tetepakan dalam restra ini dimaksudkan untuk mendukung tercapainya indikator dan target RPJMD, sehingga visi Kota Bekasi 2025-2029 dapat terwujud. Harapan kami semoga Rencana Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini bermanfaat, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan Bidang Perumahan, Kawasaan Permukiman dan Pertanahan untuk bahan perencanaan pembangunan di berbagai bidang yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

Rencana Strategis yang memuat rencana dalam kurun waktu lima tahun telah disusun sesuai dengan tahapannya dengan melibatkan semua pihak yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi. Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang hendak dicapai pada periode 2025-2030. Renstra merupakan dasar dan acuan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja); Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Dinas Kawasan Perumahan, Kawasan Permukiman, Laporan Tahunan; dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Program dan kegiatan tahunan yang telah ditetapkan melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk mencapai hasil yang maksimal dilaksanakan berdasarkan prinsip efesien, efektif, transparan dan akuntabel. Serta keberhasilan dari program dan kegiatan sangat diperlukan partisipasi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan juga dari DPRD. Dan pada akhir tahun wajib dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan, dan pada akhir tahun wajib dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan, dan mengetahui penyebab masalah yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran.

1. Kesimpulan Penting

- a. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2025-2030 merupakan pelaksanaan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah untuk menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, khususnya di bidang perumahan, kawasan

- b. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah untuk menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, khususnya di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan spesifiknya mencakup perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program kegiatan, serta menyediakan dasar untuk menyusun rencana kerja tahunan dan menjadi tolak ukur kinerja untuk pengendalian dan evaluasi.

2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD yang akan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Bekasi;

3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

- a. Memastikan kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, serta komitmen semua unsur;
- b. Melaksanakan sosialisasi dokumen Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan kepada seluruh pegawai, mitra, serta pemangku kepentingan pembangunan Kota Bekasi;

Dengan disusunnya Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025-2029, diharapkan perencanaan pembangunan bidang urusan Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan kami pun berharap adanya masukan dan saran untuk penyempurnaan Renstra ini.

Bekasi, 9 September 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN



WIDAYAT SUBROTO HARDI, S.T., M.T
NIP. 197503202002121006